

No. **179** Januari - Februari 2021

BaKTI**News**

www.baktinews.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



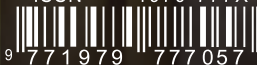
**MENGELOLA
POTENSI WISATA
PEDESAAN**

**ASMAT:
SUKU TITISAN DEWA
DI BUMI PAPUA**

**AKTA NIKAH,
KERTAS YANG BERAT**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTINews
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.baktinews.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU

Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**
Sirkulasi **KHAIRIL ANWAR**

Redaksi

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.baktinews.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.baktinews.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews**** Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTI**News** does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.*

MENJADI PELANGGAN BaKTINews**** Subscribing to BaKTI**News**

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTI**News** Online baktinews.bakti.or.id untuk dapat menerima majalah BaKTI**News** langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTI**News** cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

*You may fill out the form available on the BaKTI**News** Online page to be able to receive BaKTI**News** magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTI**News** magazine at the BaKTI office on weekdays.*

Daftar Isi

BaKTI*News*

Januari - Februari 2021

No. 179

- 1** Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Sinergi Perencanaan Kampung dengan Puskesmas
Oleh **HALIA ASRIYANI**
- 5** Mengelola Potensi Wisata Pedesaan
Oleh **CARITRA**
- 8** Desa Adat Bayan: Menjunjung Kemandirian dengan Nilai-Nilai Lokal
Oleh **CARITRA**
- 11** Asmat: Suku Titisan Dewa di Bumi Papua
Oleh **REDAKSI INDONESIA KAYA**
- 14** Agats, Kota di Atas Papan yang Tampil Menawan
Oleh **REDAKSI INDONESIA KAYA**
- 17** Berebut Ruang dengan Investasi
Oleh **AHMAD FARID**
- 21** Membicarakan BANGGA Papua
Oleh **SYAIFULLAH**
- 26** Akta Nikah, Kertas yang Berat
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K. & MUH. TAUFAN RAMLI**
- 29** Sebuah Catatan dari Kamis
Oleh **RIMA MELANI BILAUT**
- 33** Melawan Praktik “Culik Perempuan” di Sumba
Bagian II
Oleh **MARTHA HEBI**
- 36** Menjangkau Kelompok Terakhir BABS: Potret dari Sulawesi Selatan
Oleh **MUH. SALEH JASTAM**
- 40** Diskusi *Online Live* di Instagram Story @infobakti
- 41** Batukarinfo.com

■ Foto Cover : **Luna Vidya /Yayasan BaKTI**



Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Sinergi Perencanaan Kampung dengan Puskesmas

Oleh **HALIA ASRIYANI**

Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Hal ini mengingat bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang terkait erat dengan segala aspek kehidupan. Kesehatan juga menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menjadi tugas pemerintah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu hidup sehat. Caranya dengan memastikan tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau untuk semua anggota masyarakat, dalam hal ini adalah penyediaan pelayanan kesehatan dasar. Layanan dengan ujung tombak Puskesmas ini adalah penyediaan pelayanan terdepan bagi kesehatan dasar masyarakat. Puskesmas adalah unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan pada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tertentu.

Untuk mampu menjawab kebutuhan masyarakat, Puskesmas memerlukan kemampuan dasar berupa kemampuan memberikan layanan yang berkualitas, kemampuan komunikasi dan advokasi, kemampuan

kerja sama dengan mitra dan berbagai pihak dan kemampuan manajemen. Manajemen Puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Manajemen Puskesmas tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Seluruh kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan berkesinambungan.

Perencanaan dimaksudkan untuk mengkonsep keadaan yang lebih cocok dengan apa yang diinginkan serta menemukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan tingkat Puskesmas disusun untuk memecahkan



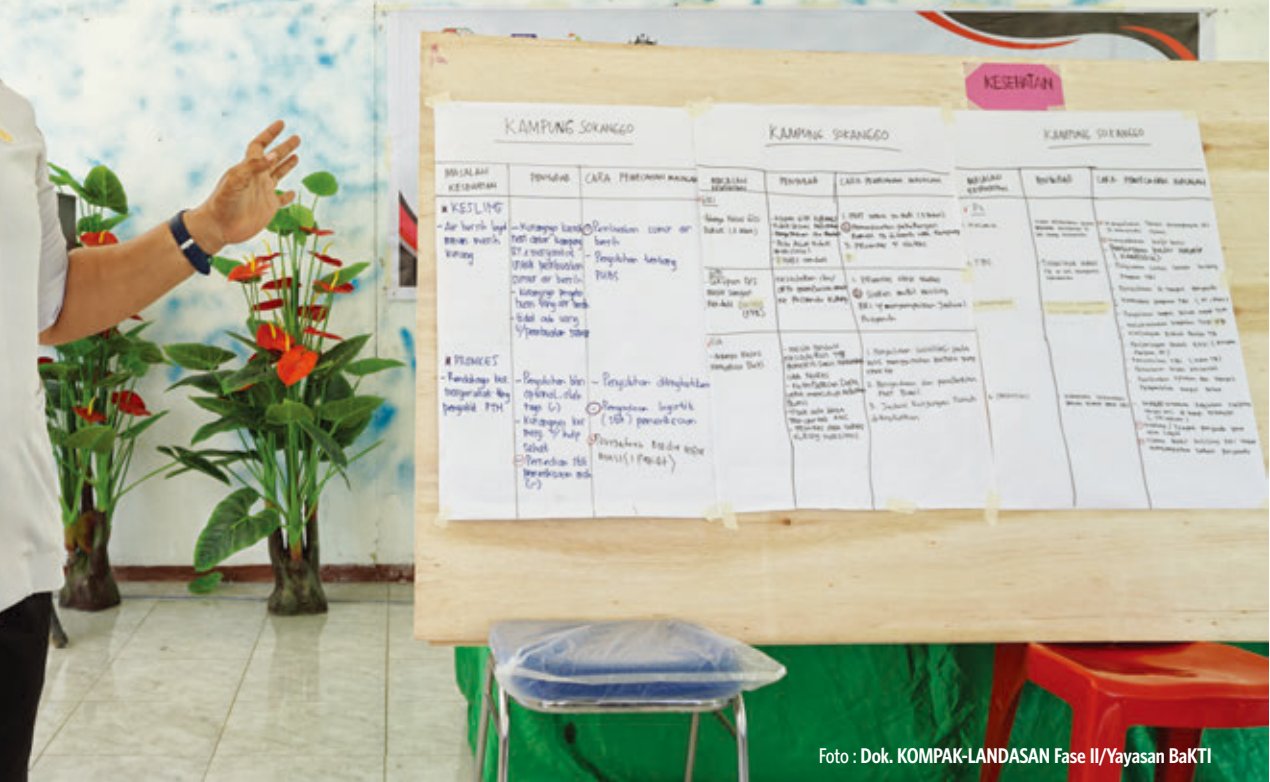


Foto : Dok. KOMPAK-LANDASAN Fase II/Yayasan BaKTI

masalah kesehatan yang ada di wilayah kerjanya. Perencanaan tingkat Puskesmas disusun untuk kebutuhan Rencana Lima Tahunan dan Rencana Tahunan.

Proses Perencanaan Puskesmas

Dalam menyusun sebuah perencanaan, terlebih dahulu diperlukan informasi untuk melakukan analisis terhadap situasi kesehatan yang dihadapi oleh Puskesmas. Hal ini juga untuk merumuskan kebutuhan pelayanan dan pemenuhan harapan masyarakat yang rasional sesuai dengan keadaan wilayah Puskesmas. Informasi ini diperoleh dari data kesehatan periode lima sampai dengan dua tahun sebelumnya untuk Perencanaan Lima Tahunan, sementara Data periode dua tahun sebelumnya untuk Perencanaan Tahunan. Data-data ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di wilayah tersebut.

Masalah-masalah yang telah diidentifikasi lalu ditentukan prioritas masalah berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan dan pertumbuhannya.

Setelah ditemukan masalah-masalah yang menjadi prioritas, langkah selanjutnya adalah menemukan akar penyebab masalah tersebut. Kemungkinan penyebab masalah sendiri beraneka ragam. Dapat berasal dari input (sumber daya), sarana, prasarana, alat kesehatan, tenaga, obat, bahan habis pakai, anggaran, data, pelaksanaan kegiatan (proses) dan lingkungan. Proses ini penting untuk langkah berikutnya yaitu menentukan metode pemecahan masalah. Hal ini agar metode pemecahan masalah yang dihasilkan sesuai dengan penyebab masalah yang terjadi. Sehingga permasalahan dapat benar-benar terselesaikan dan mencapai target dari pelaksanaan program Puskesmas.

Melihat proses perencanaan Puskesmas di atas, menyusun perencanaan memang adalah



Foto : Dok. KOMPAK-LANDASAN Fase II/Yayasan BaKTI

proses yang cukup panjang. Namun, proses ini akan menjadi lebih maksimal jika kampung ikut terlibat dalam memberikan input terhadap proses penyusunan rencana program ini, mengingat bahwa masyarakat adalah objek dari layanan kesehatan yang disediakan oleh Puskesmas. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam mengonfirmasi masalah yang ditentukan, serta mendengarkan harapan dan keinginan masyarakat terhadap penyediaan layanan kesehatan, akan menjadi masukan untuk menentukan metode pemecahan masalah dan program kerja Puskesmas. Di samping itu, kampung sendiri pun dapat berpartisipasi dalam menjawab permasalahan kesehatan yang ada jika mereka mengetahui masalah kesehatan yang sedang dihadapi. Untuk itu, diperlukan sinergi perencanaan antara kampung dengan Puskesmas agar mereka dapat bekerja sama untuk layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

Sinergi Perencanaan antara Kampung dengan Puskesmas

Sinergi Perencanaan Puskesmas dengan Kampung dapat diartikan sebagai kerja sama yang sengaja diarahkan untuk saling mengisi dan melengkapi guna mencapai hasil yang lebih baik

dibandingkan dikerjakan oleh Puskesmas dan kampung sendiri-sendiri. Kehadiran Puskesmas dimaksudkan untuk memberikan layanan terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas. Keberhasilan Puskesmas melakukan fungsinya dalam pemberian layanan yang bermutu berarti yang diuntungkan adalah masyarakat yang dilayani. Tahapan melaksanakan sinergi perencanaan di Puskesmas dilakukan dengan memodifikasi tahapan perencanaan Puskesmas yang memang ada dalam sistem perencanaannya sehingga prosesnya dapat berjalan dengan terlibat pada proses perencanaan kampung. Dengan demikian, proses perencanaan Puskesmas akan mengikuti siklus perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dengan sinergi perencanaan dengan kampung.

Dengan pelibatan Puskesmas dan kampung dalam masing-masing perencanaannya berarti menyusun perencanaan dengan lebih partisipatif. Puskesmas bersama dengan kampung, dalam hal ini aparat kampung dan perwakilan masyarakat, akan duduk bersama untuk membicarakan mengenai permasalahan kesehatan di kampung mereka. Dalam forum musyawarah kampung, masyarakat dapat menyampaikan masalah dan harapan mereka

terhadap pelayanan kesehatan yang ada. Pada waktu yang sama, Puskesmas dapat mendengarkan langsung dan menanggapi permasalahan dan harapan yang diutarakan masyarakat. Informasi-informasi yang diperoleh ini pun akan menjadi bahan bagi Puskesmas untuk menentukan program kerja mereka baik dalam lima tahun ke depan maupun dalam perencanaan tahunannya. Dengan adanya proses ini, masyarakat pun dapat teredukasi dan menyadari persoalan kesehatan yang mereka hadapi dan bersama-sama untuk memikirkan solusi atas persoalan tersebut.

Sinergi perencanaan antara kampung dengan Puskesmas adalah program yang sejak tahun 2019 telah dibangun dan dikerjakan oleh Program KOMPAK-LANDASAN Fase II. Dengan tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar berkualitas, program ini dijalankan di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat. Wilayah tersebut adalah kabupaten Jayapura, Nabire, Asmat, Boven Digoel, Manokwari Selatan, Fakfak, Sorong dan Kaimana. Kegiatan ini dilakukan secara langsung dengan mendampingi proses perencanaan di tingkat kampung yang dilakukan secara bersinergi dengan Puskesmas. Selain Puskesmas, sinergi perencanaan pun dijalankan antara kampung dengan sekolah dasar untuk peningkatan layanan dasar di bidang pendidikan. Pendampingan sinergi perencanaan ini telah dikerjakan di 12 kampung dan 8 Puskesmas di Papua dan Papua Barat. Pendampingan tersebut pun telah menghasilkan dokumen perencanaan kampung dan Puskesmas yang disusun dengan saling bersinergi.

Berdasarkan proses pendampingan yang telah dilakukan, faktanya terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh Puskesmas yang memerlukan peran serta kampung dalam penyelesaiannya. Seperti yang terjadi di salah satu wilayah dampingan program yaitu Kampung Marsi yang terletak di Kabupaten Kaimana Papua Barat. Data Puskesmas menunjukkan bahwa sejumlah 80% ibu hamil tidak memeriksakan kandungannya secara rutin dan tidak melahirkan di fasilitas kesehatan. Meskipun pihak Puskesmas telah berulang kali merencanakan program sosialisasi mengenai

pentingnya memeriksakan kandungan secara rutin dan melahirkan di fasilitas layanan kesehatan, namun masalah yang sama terus berulang setiap tahunnya.

Forum musyawarah kampung pun menjadi wadah bagi Puskesmas untuk mengemukakan persoalan yang dihadapi tersebut. Pihak kampung akhirnya memasukkan pembuatan peraturan kampung yang mengharuskan ibu hamil untuk memeriksakan kandungannya secara rutin dan mewajibkan proses persalinan dilakukan di fasilitas layanan kesehatan ke dalam program kerja mereka. Demikianlah bentuk sinergi perencanaan kampung dan Puskesmas untuk menjawab persoalan kesehatan di tingkat kampung. Masing-masing unit layanan dapat mengambil peran yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Kampung Waharia, Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Sering kali kader Posyandu Balita dan Lansia kurang aktif menjalankan tugas karena menerima insentif yang sangat minim menjadi salah satu permasalahan. Padahal balita dan lansia di kampung perlu terus dipantau kesehatan dan kesejahteraannya. Atas permasalahan ini, pemerintah kampung lalu bersedia menaikkan dana insentif bagi kader menggunakan dana kampung. Sementara itu, Puskesmas akan memantau keaktifan kader dan memberikan beragam pelatihan yang dibutuhkan.

Bentuk-bentuk kolaborasi semacam inilah yang diharapkan dapat terwujud di seluruh unit layanan dan kampung. Kolaborasi ini tidak cukup hanya dengan inisiatif perorangan dari aparat kampung dengan tenaga kesehatan di Puskesmas. Bentuk kolaborasi ini perlu hadir secara terinstitusional agar menjadi sebuah bagian dalam sistem perencanaan dalam setiap unit layanan. Dengan demikian, sinergi perencanaan Puskesmas dan kampung dapat menghasilkan perbaikan mutu layanan dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendukung pencapaian hasil kerja Puskesmas.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN Fase II, dapat menghubungi info@bakti.or.id



Mengelola Potensi Wisata Pedesaan

Oleh **CARITRA**

D

esa memiliki banyak sekali potensi yang masih belum dimanfaatkan atau belum diolah secara baik, terutama pada sektor wisata. Setiap desa memiliki potensi yang kadang masyarakat sekitarnya sendiri pun belum melihat potensi tersebut. Padahal sektor pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan dan mampu memberikan sumbangan yang sangat baik untuk kemandirian desa. Akhir-akhir ini wisatawan beralih dari wisata konvensional beralih ke wisata yang memiliki rasa peduli terhadap lingkungan, alam, dan budaya. Wisata yang memberikan penghargaan terhadap lingkungan, alam, dan budaya tidak lepas dari



(kiri) Desa Adat Beleq di Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, terletak di kaki gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Foto: Yusuf Ahmad /Yayasan BaKTI

(atas) Objek wisata pemakaman gua tradisional Londa di Desa Sadan Uai, Kecamatan Sanggalangi, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Foto: Ichsana Djunaed /Yayasan BaKTI

dukungan lingkungan yang berada di desa, yang digerakkan untuk mendukung potensi wisata pedesaan.

Potensi wisata lokal yang ada di desa memang akhir-akhir ini sangat diminati oleh wisatawan yang rindu pada alam terbuka, interaksi dengan lingkungan, dan masyarakat lokal. Dalam Antara dan Arida (2015) Desa Wisata (*rural tourism*) merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur yang unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan (Joshi, 2012). Dari penjelasan tentang desa wisata bisa dikatakan bahwa pariwisata pedesaan memberikan potensi yang dimiliki desa untuk dinikmati oleh masyarakat. Sehingga pengelolaan potensi wisata pedesaan merupakan hal utama

untuk menuju desa wisata. Bagaimana cara mengelola potensi desa untuk menjadi Desa Wisata?

Setiap desa memiliki keunikan yang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi desa tersebut. Daya tarik setiap desa dapat terlihat secara langsung atau membutuhkan upaya untuk menggali kembali. Daya tarik wisata bisa berupa potensi alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, atau potensi budaya seperti adat-istiadat, museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan lain-lain, juga potensi buatan manusia. Suatu wilayah wisata pasti memiliki daya tarik yang berbeda satu sama lain. Setiap desa bisa menjadi sebuah tempat wisata jika masyarakat, organisasi, dan pemerintah dapat mengolah potensi yang dimiliki oleh desa.

Beberapa langkah dalam menemukenali potensi desa wisata adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pemetaan desa. Pemetaan desa dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah yang terdapat pada desa. Untuk mengetahui tempat yang memiliki potensi sebagai destinasi wisata dan permasalahan apa saja yang ada.

Langkah kedua dalam menemukenali potensi desa wisata adalah melakukan analisis karakteristik dan ukuran keberhasilan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat (*community based-tourism*), untuk mengetahui karakteristik *community based-tourism* yang



terdapat pada desa tersebut. Langkah ketiga yaitu merumuskan pola pengembangan *community based-tourism*, untuk mendapatkan hasil dari analisis sebelumnya dan untuk mendeskripsikan pola pengembangan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, langkah keempat adalah melakukan analisis sistem dan elemen kepariwisataan. Analisis ini meliputi daya tarik wisata, akomodasi, infrastruktur, promosi, minat wisatawan, dan masyarakat.

Setelah menentukan potensi yang dimiliki desa, selanjutnya untuk menjadi desa wisata harus memiliki produk pariwisata atau yang disebut dengan destinasi wisata. Destinasi berkaitan dengan sebuah tempat atau wilayah yang memiliki sebuah keunggulan atau ciri khas untuk menarik wisatawan. Ciri khas bisa secara geografis atau budaya, seperti pegunungan, laut, bukit, hamparan savana, budaya lokal seperti tarian lokal, perayaan adat, dan sebagainya. Untuk membuat sebuah destinasi wisata yang unggul, menurut Cooper (1993) dalam Antara dan Arida (2015), sebelum sebuah destinasi diperkenalkan dan dijual seperti halnya desa wisata, terlebih dahulu harus mengkaji empat aspek utama (4A) yang harus dimiliki, yaitu *attraction* (daya tarik), *accessibility*

Kemampuan tenun secara tradisional yang diwariskan secara turun-temurun banyak dijumpai di beberapa desa di pulau Sumba. Ciri khas budaya yang menjadi magnet bagi wisatawan, mendorong sebuah desa menjadi destinasi wisata.

Foto: Hariandi Hafid /Yayasan BaKTI

(aksesibilitas/keterjangkauan), *amenity* (fasilitas pendukung), dan *ancillary* (organisasi atau kelembagaan pendukung). Destinasi wisata sebagai daya tarik wisatawan untuk berkunjung dan menikmati sangat penting untuk diperhatikan karena nilai jual dari tempat wisata adalah destinasinya.

Mengelola potensi desa untuk dijadikan tempat wisata merupakan hal yang cukup sulit jika seluruh masyarakat tidak ikut mengambil peran dalam mengelola. Meskipun memiliki potensi yang sangat baik tetapi lingkungan masyarakat tidak mendukung, bisa jadi seluruh potensi tersebut bisa tidak memiliki hasil atau malah akan diambil oleh kelompok dari luar desa sendiri. Prinsip pengembangan desa wisata adalah sebagai salah satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan desa yang berkelanjutan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari website CARITRA <https://www.caritra.org/2020/11/25/sustainabilitas-program-desa-mandiri-pangan/>



Sumber: www.geopitomboksumba.com

Desa Adat Bayan

Menjunjung Kemandirian dengan Nilai-Nilai Lokal

Oleh **CARITRA**

Untuk mempertahankan dan tetap menjalankan tradisi peninggalan leluhur beberapa cara berikut dapat dilakukan.

- Melalui pembelajaran berbasis pengalaman dengan terlibat langsung dalam semua proses kegiatan ritual adat.
- Melalui wadah diskusi yang saat ini dikembangkan seperti perpustakaan masyarakat adat, pembuatan media visual berupa buku bergambar, poster atau video pendek tentang masyarakat adat Bayan.
- Memperkuat tugas dan fungsi sebagai *prusa* atau jabatan adat.
- Meningkatkan kapasitas sanggar kesenian, sanggar tenun, dan lain-lain.
- Mengembangkan desa wisata sebagai alat untuk belajar tentang jati diri budaya.



Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman yang begitu banyak, begitupun dengan suku bangsanya. Wilayah yang didiami oleh kelompok suku dengan tetap melestarikan adat dan istiadat masih sering dijumpai di Indonesia. Desa adat, merupakan julukan desa yang di dalamnya masih menjunjung tinggi nilai kearifan lokal, adat, dan tradisi yang telah turun temurun dari nenek moyang terdahulu.

Keunikan desa adat digambarkan melalui salah satu desa yang berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat yaitu Desa Adat Bayan. Desa Adat Bayan adalah desa tua yang terletak di lereng utara Gunung Rinjani. Secara administratif, Desa Adat Bayan memiliki luas sekitar 2.600



hektar dan merupakan salah satu dari 9 desa yang ada di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Jumlah penduduk di desa ini mencapai 5.373 jiwa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.

Desa Adat Bayan memiliki keterikatan adat dengan desa lain. Satu desa dengan desa lain memiliki peran dan tugas masing-masing sesuai dengan tatanan sosialnya. Tatanan sosial dan hukum adat mengatur dan mengikat secara keseluruhan sendi kehidupan masyarakat Desa Adat Bayan.

Hubungan tersebut mengatur antara manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan alam, serta hubungan antar sesama manusia. Hukum tersebut menciptakan hukum adat yang pertimbangan utamanya ialah memikirkan kebutuhan air untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat hingga anak cucu di masa yang akan datang. Hukum ini sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep tersebut diterapkan oleh masyarakat Desa Adat Bayan dengan menjaga hulu sampai hilir sungai, dengan tetap menjunjung kemandirian nilai-nilai lokal.

Untuk menjaga kelestarian air, maka kelestarian hutan menjadi sangat penting. Oleh karenanya, hukum adat sangat ketat dalam mengatur kelestarian hutan. Hutan adat memiliki fungsi sosial, ekologi dan ekonomi yang memberikan kehidupan bagi masyarakat Desa Adat Bayan. Terdapat 8 hutan adat yang diatur dalam hukum adat, yaitu Hutan Adat

Para lelaki yang bertugas untuk penyembelihan, menyembelih kerbau dalam ritual Selamat Asuh Mesigit. (Foto: Fathul Rakhman/ Mongabay Indonesia)

Pangempokan, Bangket Bayan, Tiurangan, Mandala, Lokoq Getaq, Singang Borot, Sambel, dan Montong Gedeng.

Untuk menjaga kelestarian hukum adat, masyarakat Desa Adat Bayan menggunakan '*awiq-awiq*' atau sanksi apabila terdapat hukum adat yang dilanggar. Terdapat lima peraturan hukum adat masyarakat Desa Adat Bayan, yaitu:

1. Dilarang mengambil, memetik, mencabut, menebang, menangkap satwa, dan membakar pohon/kayu-kayu yang mati yang terdapat di kawasan hutan adat.
2. Dilarang menggembala ternak di sekitar pinggir dan di dalam kawasan hutan adat yang dapat menyebabkan rusaknya flora dan fauna hutan.
3. Dilarang mencemari/mengotori sumber mata air di dalam kawasan hutan adat.
4. Dilarang meracuni Daerah Aliran Sungai (DAS) menggunakan fottas, decis, setrum, dan lainnya di sekitar hutan dan di luar kawasan hutan adat yang dapat menyebabkan terbunuhnya biotik hidup yang ada di sungai.
5. Bagi setiap pemakai/pengguna air baik perorangan maupun kelompok diwajibkan membayar iuran/*sawinih* kepada pengelola hutan dan sumber mata air.



Masjid kuno Bayan Beleq. Foto: **Torben Brinker / Wikipedia**

Selain hukum adat yang mengikat, masyarakat Desa Adat Bayan juga memiliki bangunan tradisional yang unik, yaitu *Berugak*, *Geleng*, dan *Bale Mengina*. *Berugak* merupakan bale panggung yang digunakan masyarakat untuk menerima tamu dan bersosialisasi dengan tetangga. Materialnya menggunakan kayu berkaki empat (*saka empat*) dan enam (*saka enam*). *Geleng* merupakan bangunan yang digunakan sebagai lumbung pangan di desa dengan menggunakan empat tiang kayu utama sebagai penyangga. Kemudian terdapat *Bale Mengina* yang digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat tradisional Bayan. Nilai-nilai lokal ini yang masih dijunjung tinggi masyarakat Desa Adat Bayan.

Dengan keunikan yang dimiliki oleh Desa Adat Bayan, masyarakat luar tertarik untuk berkunjung sehingga memunculkan aktivitas pariwisata disana. Sektor pariwisata digunakan sebagai peningkatan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas ekologi dan sosial budaya. Potensi alam serta adat istiadat dikemas menjadi Desa Wisata Budaya. Produk wisata yang ditawarkan antara lain pemandian alam, pengenalan budaya sejarah Islam di Lombok, kuliner, kesenian, dan kerajinan asli masyarakat Desa Adat Bayan.

Tidak hanya di Desa Adat Bayan saja, masih banyak Desa Adat di Indonesia yang bangga

dengan hasil budaya mereka sendiri dan masih menjunjung nilai-nilai lokal, dalam pengelolaan hutan adat pun juga sama. Adanya hukum adat yang menjadi *common law* bagi masyarakat, dapat menjaga kelestarian hutan sehingga ketersediaan bahan makanan di hutan tetap adat. Meski begitu, tidak cukup dengan adanya hukum adat saja. Kesiapan daerah diperlukan untuk mengatur dan mengintegrasikan hukum adat dalam peraturan daerah. Pemerintah daerah seharusnya menjadi poros utama dalam mengatur penataan ruang yang berbasis adat dan istiadat setempat.

Sama seperti hutan adat, pengelolaan sektor pariwisata di desa adat juga perlu diperhatikan. Sektor pariwisata diibaratkan seperti bak pisau yang dapat melukai diri sendiri apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Perlindungan budaya dan nilai desa adat jangan sampai tergerus dengan adanya dinamisasi dari sektor pariwisata. Disinilah peran tokoh masyarakat dan orang tua dalam mengingatkan generasi muda agar tidak tergerus budaya modern, dengan tetap mengajarkan untuk menjunjung kemandirian dengan nilai-nilai lokal dalam desa adat.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari website CARITRA <https://www.caritra.org/2020/07/13/desa-adat-bayan-menjunjung-kemandirian-dengan-nilai-nilai-lokal/>



Pria-pria Asmat yang berfoto dengan tifa, alat musik khas Papua.

Asmat: Suku Titisan Dewa di Bumi Papua

Teks & Foto: **INDONESIA KAYA**

P

ada zaman dahulu kala, satu Dewa bernama *Fumeripitsy* turun ke bumi. Ia menjelajah bumi dan memulai petualangannya dari ufuk barat matahari terbenam. Dalam petualangannya, Sang Dewa harus berhadapan dengan seekor buaya raksasa dan mengalahkannya. Walaupun menang, sang Dewa terluka parah dan terdampar di sebuah tepian sungai.

Dengan kesakitan sang Dewa berusaha bertahan hingga akhirnya ia bertemu seekor burung Flaminggo yang berhati mulia dan merawat Sang Dewa hingga pulih dari lukanya. Setelah sembuh, sang Dewa tinggal di wilayah tersebut dan membuat sebuah rumah serta mengukir dua buah patung yang sangat indah. Ia juga membuat sebuah genderang yang sangat nyaring bunyinya untuk mengiringinya menari tanpa henti. Gerakan sang Dewa sungguh dahsyat hingga membuat kedua patung yang diukirnya menjadi hidup. Tak lama kemudian, kedua patung itu pun ikut menari dan bergerak mengikuti sang Dewa. Kedua patung tersebut adalah pasangan manusia pertama yang menjadi nenek moyang suku Asmat.



(kiri atas) Salah satu pengukir kayu di Asmat yang masih bertahan, ukiran asmat sangat terkenal dan banyak di minati wisatawan. (kiri bawah) Para wanita Asmat yang bersiap untuk menari. (kanan atas) Wanita Asmat yang menari tarian Panen Sagu.

Penggalan mitologi di atas adalah sebuah kepercayaan yang dimiliki oleh Suku Asmat, salah satu suku yang terbesar di Papua. Mitos ini membuat suku Asmat masih memercayai bahwa mereka adalah titisan dewa hingga kini. Tidaklah berlebihan, karena Asmat memang memiliki kebudayaan yang sangat dihormati. Bahkan, suku ini sudah dikenal hingga ke mancanegara, sehingga tidak asing bila ada peneliti-peneliti dari seluruh penjuru dunia sering berkunjung ke kampung suku Asmat. Mereka umumnya tertarik untuk mempelajari kehidupan suku Asmat, sistem kepercayaannya, serta adat istiadat yang begitu unik dari suku Asmat.

Suku Asmat sendiri sebenarnya terbagi lagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial dan keseharian kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman, biasanya

mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun, sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Perbedaan kedua populasi ini disebabkan juga oleh kondisi wilayah tempat mereka tinggal dan besarnya pengaruh masyarakat pendatang yang umumnya lebih terbuka daripada kebudayaan Asmat sendiri.

Walaupun kedua populasi ini punya banyak perbedaan, namun keduanya memiliki karakteristik yang sama. Misalnya, dari segi ciri-ciri fisik. Suku Asmat memiliki rata-rata ketinggian sekitar 172 cm untuk pria dan 162 cm untuk wanita. Kulit mereka umumnya hitam dengan rambut yang keriting. Ciri fisik ini disebabkan karena suku Asmat masih satu keturunan dengan warga Polynesia.

Wilayah persebaran suku Asmat dimulai dari pesisir pantai laut arafuru hingga pegunungan Jayawijaya. Secara keseluruhan mereka menempati wilayah kabupaten Asmat yang punya kurang lebih 7 kecamatan. Walau



Anak-anak Desa Sawaerma

nampaknya dekat, namun jarak antar kampung dan kampung dengan kota kecamatan sangat jauh, bahkan perjalanannya dapat memakan 1 hingga 2 hari dengan berjalan kaki. Hal ini mereka lakukan bukan karena mereka tidak bisa memasukkan kendaraan ke Asmat, namun wilayah Asmat yang berawa-rawa hanya bisa dilewati dengan perahu atau berjalan kaki.

Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Ukiran Asmat sangat banyak jenisnya dan beragam. Namun, biasanya ukiran yang dihasilkan bercerita tentang sesuatu, seperti kisah leluhur, kehidupan sehari-hari dan rasa cinta mereka terhadap alam. Keunikan ukirannya inilah yang membuat nama suku Asmat begitu mendunia hingga kini.

Selain kesenian, salah satu tradisi yang sangat menarik untuk disimak adalah rumah Bujang atau yang biasa dikenal dengan sebutan *Jew*. Rumah ini adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan suku Asmat. *Jew* menjadi rumah utama tempat mengawali

segala kegiatan suku Asmat di tiap desa yang ada. Begitu pentingnya, hingga dalam mendirikan *Jew* pun ada upacara khusus yang harus dilakukan. *Jew*, hanya ditinggali oleh pria-pria yang belum menikah. Sesekali kaum wanita boleh masuk tetapi harus dalam situasi pertemuan besar.

Suku Asmat banyak memiliki kesenian tari dan nyanyian. Mereka menampilkan tari-tarian berikut nyanyian ini ketika menyambut tamu, masa panen, dan penghormatan kepada roh para leluhur. Mereka sangat hormat kepada para leluhurnya, hal ini terlihat dari setiap tradisi yang mereka miliki. Walaupun kini kebudayaan modern sudah banyak berpengaruh pada kehidupan mereka, namun tradisi dan adat Asmat akan sulit untuk dihilangkan. Suku Asmat memiki kebudayaan yang luar biasa dan layak untuk menjadi objek utama yang patut dipelajari lebih jauh saat berkunjung ke Papua

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari: <https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/asmat-suku-titisan-dewa-di-bumi-papua>

Agats, Kota di Atas Papan yang Tampil Menawan

Teks & Foto: **INDONESIA KAYA**

A

lkisah, hampir seratus tahun lalu, seorang Pastor berkebangsaan Belanda bernama Jan Smith melancarkan misi pekabaran Injil di wilayah pedalaman suku Asmat. Kala itu segalanya masih terbatas dan suku Asmat masih sangat primitif. Pastor Jan Smith menghadapi tantangan berat di dalam misinya, namun ia tetap bertahan di dalam keteguhan hatinya melayani Tuhan. Hingga suatu ketika, sang Pastor terbunuh oleh sebab yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Namun, sebelum meninggal Jan Smith pernah membuat sebuah pernyataan yang sering juga diartikan sebagai kutukan oleh penduduk setempat. Sebuah wilayah pesisir selatan Papua yang bernama Agats ini akan basah dan menjadi wilayah rawa untuk selamanya.





Hingga kini, penduduk Agats masih percaya pada mitos kutuk tersebut. Mereka menganggap ucapan yang dilontarkan oleh sang Pastor adalah penyebab kota Agats akan selalu menjadi kota yang berdiri di atas rawa. Bahkan, ucapan Pastor yang patungnya didirikan di pelabuhan kecil Agats ini sudah menjadi cerita yang tersebar luas dari mulut ke mulut dan dianggap sebagai mitos terjadinya tanah berlumpur di Agats.

Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran baru Kabupaten Asmat yang merupakan bagian dari Provinsi Papua. Kota ini berada di pesisir selatan pulau Papua berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Karena posisinya yang dekat dengan Timika, maka akan lebih mudah mencapai Agats dari kota Timika dengan menggunakan kapal laut atau pesawat perintis. Agats yang berpenduduk sekitar 76.000 jiwa ini merupakan kota penting bagi distrik-distrik di sekitarnya. Kota ini memegang peranan utama di dalam menjalankan roda perekonomian dan pemerintahan di Kabupaten baru Asmat ini.

Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana

jalan yang berupa papan, sekilas jalan ini menyerupai dermaga. Seluruh jalan di kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Namun seiring perkembangan jaman dan teknologi, jembatan-jembatan ini kemudian mulai disempurnakan dalam bentuk beton yang lebih kuat lagi. Hingga saat ini, pengembangan ibukota Kabupaten Asmat ini dilakukan di atas jalanan yang unik ini. Semua bangunan di kota dengan luas hampir 30.000 kilometer persegi ini pun menyesuaikan dengan bentuk rumah-rumah panggung. Bahkan, alat transportasi utama di dalam kota jembatan ini adalah motor, itupun motor yang menggunakan tenaga listrik.

Memang, kondisi Agats yang masih serba terbatas ini membuat pemerintah daerah dan seluruh penduduk menyesuaikan dengan keadaan. Jalan jembatan kayu yang terbentang luas di seluruh wilayah Agats tidak akan mampu menahan beban motor mesin yang cukup berat, apalagi mobil sudah dipastikan tidak akan mungkin menjadi alat transportasi. Kini, selain motor listrik, para penduduk Agats yang sebagian besar merupakan pendatang dari wilayah luar Asmat ini mengandalkan transportasi laut berupa perahu motor atau



1 Jalanan di kota Agats berupa papan dikarenakan keadaan tanah berupa rawa-rawa 2 Kehidupan masyarakat Agats dan keadaan kotanya 3 Beberapa jalur utama sudah tidak menggunakan jalan dek kayu lagi, melainkan sudah menggunakan beton 4 Salah satu sekolah dasar yang berada di kota Agats yang juga berada di atas rawa dan berlantaikan dek kayu 5 Di Agats tidak ada kendaraan bermotor, hanya ada motor yang menggunakan baterai. Hal ini dilakukan sebagai karena jalan Agats yang tidak memadai 6 RSUD Agats sebagai tempat masyarakat Agats berobat.



Uniknya kota Agats sejalan dengan budaya dan daya tarik wisata yang dimilikinya. Museum dapat menjadi titik pertama yang dapat dikunjungi sebelum mempelajari kehidupan Asmat lebih lanjut. Berbagai informasi mengenai suku Asmat dan seputar kehidupan mereka dapat diketahui di museum ini. Para wisatawan dalam dan luar Indonesia pun sudah sangat sering mengunjungi museum yang cukup terawat ini. Tidak ada biaya yang dikenakan untuk memasuki museum, hanya kesadaran para wisatawan saja untuk menyisihkan sedikit biaya bagi tambahan dana perawatan dan operasional museum ini.

sekedar berjalan kaki bila masih berada di dalam kota.

Keterbatasan lain yang dimiliki Agats adalah kurangnya pasokan air bersih. Masyarakat Agats hingga kini bertahan dengan air hujan yang ditampung di tabung-tabung air. Kondisi tanah rawa memang membuat tanah ini sulit menyediakan air bersih. Maka tidak heran bila mandi menggunakan air tampungan ini terasa lebih licin dan sulit untuk membilas sabun yang digunakan. Namun demikian, kreatifitas masyarakat membuat mereka mampu terus bertahan dalam kondisi ini.

Walaupun memiliki banyak keterbatasan, namun sarana-prasarana dan infrastruktur kota Agats sudah cukup memadai. Pelabuhan, kantor pemerintahan, rumah sakit, pasar, kantor polisi, pos tentara, sekolah, bahkan museum sudah terdapat di kota unik ini. Penduduk pun dengan leluasa melakukan berbagai aktivitas dan sedikit demi sedikit mengembangkan usaha-usaha untuk menunjang kehidupan mereka. Toko-toko kebutuhan dan rumah makan banyak sekali buka di sepanjang kota Agats, umumnya dimiliki oleh para pendatang yang mencoba peruntungan di kota rawa ini.

Selain itu, tidak jauh dari pusat kota Agats, terdapat sebuah desa tradisional bernama Syuru. Di desa ini berbagai kebudayaan khas Asmat pun dapat kita lihat secara langsung. Mulai rumah bujang “Jew” hingga ukiran-ukiran kebanggaan Asmat dapat kita saksikan prosesnya di desa ini. Desa Syuru dapat menjadi titik awal untuk mempelajari berbagai kebudayaan Asmat sebelum masuk langsung ke wilayah pedalaman lain seperti Sawaerma atau Asuwetsy. Kota Agats seakan menjadi mukadimah sebelum memulai petualangan lebih jauh lagi untuk mengenal keberadaan suku Asmat di bumi Papua.

Keberadaan kota Agats adalah sebuah bukti kegigihan perjuangan para penduduknya. Dalam berbagai keterbatasannya, kota ini terus berdiri dan justru mengembangkan diri ke arah yang semakin baik. Kota ini menjadi penunjang utama dan tempat bergantung bagi suku Asmat di bumi Papua. Kota Agats juga merupakan tonggak pertumbuhan wisata Asmat yang tentu saja mendatangkan devisa bagi Indonesia. Inilah wajah Agats yang begitu unik dan sangat menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Sebuah kota di atas papan yang selalu tampil menawan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari: <https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/agats-kota-di-atas-papan-yang-tampil-menawan>



Foto: Dok. Ahmad Farid

Berebut Ruang dengan Investasi

Oleh **AHMAD FARID**

Negeri Kie Raha

Berdiri di pesisir Ternate yang menghadap ke pulau Tidore dan Maitara mengingatkan kita pada gambar di lembar alat transaksi resmi Indonesia. Keindahan ini seakan berpadu dengan perjalanan kesejarahan empat pilar kerajaan penting di wilayah Maluku Utara yakni kerajaan Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan telah mengisi kolom-kolom sejarah panjang perjalanan nusantara. Posisi pentingnya empat kerajaan ini memunculkan satu istilah penyebutan lain bagi Maluku Utara yakni Kei Raha atau empat gunung.

Desa Gane Dalam merupakan salah satu dari 250 desa yang ada di kabupaten Halmahera Selatan yang beribukota di Bacan. Mayoritas

penduduk bermatapencaharian petani kebun dan nelayan. Beberapa tanaman produktif bulanan dan tahunan yang dihasilkan adalah buah-buahan, sayur mayur, cabe, ubi, kelapa, pala, dan cengkik.

Sejarah panjang perebutan penguasaan wilayah antar empat kerajaan tersebut disertai perluasan pengaruh hingga ke Papua di sebelah Timur dan Sulawesi di sebelah barat yang pada akhirnya didominasi oleh dua kerajaan utama yakni Ternate dan Tidore tidak terlepas dari perebutan ruang ekonomi berbasis hasil sumber daya alam berupa rempah-rempah. Dan bahkan pelibatan negara-negara penjajah seperti Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, di negeri Kei Raha ini juga bagian dari perebutan ruangekonomi ini.



Foto: Dok. Ahmad Farid

Pemahaman akan sejarah perjalanan negeri Kie Raha ini memberikan pemahaman tambahan bagaimana memahami situasi konflik yang terjadi di Maluku Utara terutama pada aspek sosialnya, mengingat relasi kekuasaan raja Ternate dan Tidore dengan wilayah-wilayah penguasaannya pada masa lalu masih memiliki pengaruh yang besar hingga saat ini, terutama bagi sebagian besar masyarakat yang hidup di pedesaan.

Orang Gane dan wilayah kelolanya

Sebagai bagian dari paparan nusantara yang memiliki lebih 17 ribu pulau, kabupaten Halmahera Selatan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki jumlah pulau terbanyak di Indonesia. Dengan jumlah hampir 1000 pulau dengan 7 pulau besar di dalamnya yakni Bacan, Makian, Kayoa, Kasiruta, Mandioli, Obi dan Gane.

Kondisi alam yang berpulau-pulau dan dikelilingi laut sebagai pemersatunya, menghasilkan kekhasan adat dan budaya, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Daratan kepulauan dan lautannya bagi masyarakat Gane adalah sumber penghidupan. Karena dari kedua ranah tersebut mereka mendapatkan sumber karbohidrat, protein, mineral, vitamin, kayu untuk rumah dan perahu

serta obat-obatan herbal. Semua kekayaan tersebut didukung oleh kesuburan tanah dan laut yang ada di sekitarnya.

Dalam pengelolaan wilayahnya, secara makro masyarakat membagi tiga ruang yakni pertama, wilayah pemukiman, pemukiman orang Gane dalam terkonsentrasi di satu titik baik dalam administrasi dusun maupun desa yang saling berdekatan. Ruang kedua adalah wilayah perkebunan. Lahan perkebunan masyarakat berada agak jauh dari lokasi pemukiman warga, untuk mencapai lokasi kebun, warga banyak yang menggunakan perahu dayung dan atau perahu mesin tempel. Wilayah ketiga adalah perairan. Secara umum masyarakat Gane Dalam memanfaatkan wilayah perairannya sebagai sarana mobilitas dan sumber protein dari ikan-ikan yang mereka tangkap secara tradisional lewat pancing dan bubu.

Secara umum, masyarakat memiliki lahan kelolanya berdasarkan warisan turun temurun serta memiliki nilai sejarah, karena dalam proses pembukaannya pun mereka menggunakan ritual adat yang disebut Tolagum. Sejarah panjang masyarakat Gane tidak terlepas dari perjalanan panjang kerajaan Ternate dan Tidore atau Kie Raha pada umumnya. Karenanya mereka



termasuk pada komunitas yang sudah cukup tua.

Beberapa hasil kebun utama yang menjadi penopang hidup masyarakat: buah kelapa yang sudah mereka olah menjadi kopra, kemiri, kenari serta hasil perkebunan semusim cabai, terong, dan kacang. Sedangkan olahan siap konsumsi seperti keripik pisang, kerupuk popaco sejenis kerang-kerangan yang ada di wilayah mangrove masih dalam tahap uji coba.

Jika dilihat dari perspektif budaya, orang Gane Dalam memiliki kultur dominan sebagai petani walaupun wilayahnya dikelilingi lautan. Kultur petani ini tercermin dari aktivitas ekonomi dan relasi dominan yang terjadi di masyarakat. Maka tidaklah mengherankan sumber daya kelautan yang dimiliki desa Gane Dalam masih terjaga dengan baik, masyarakat hanya mengambil ikan seperlunya untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga dan biasanya dilakukan dalam perjalanan pulang dari kebun, ikan yang diambil pun hanya ikan tertentu seperti cakalang, tongkol, tuna dan kerapu.

Kediaman yang mulai terusik

Kedamaian masyarakat Gane dalam dan luar bersama anugerah sumber daya alam dan

lingkungannya yang luar biasa mulai terusik ketika PT. Gelora Mandiri Membangun (GMM), anak perusahaan dari PT. KORINDO yang berbasis di Korea Selatan, berinvestasi di Halmahera Selatan dengan membangun perkebunan kelapa sawit. Luasan wilayah konsesi untuk budidaya sawit atas nama PT. Gelora Mandiri Membangun adalah 11.003,90 hektar (SK Menteri Kehutanan No SK.22/MENHUT-II/2009 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan produksi. Dari luasan tersebut yang sudah dibuka saat ini kurang lebih 1.000 hektar (250 hektar untuk camp pada tahun 2013, 500 hektar realisasi dan 250 hektar lahan pembibitan pada tahun yang sama).

Sejak perusahaan sawit beroperasi di wilayah Gane, masyarakat kini menghadapi berbagai tantangan selain persoalan lahan (wilayah kelolanya). Setidaknya akan ada 20 desa yang terancam wilayah kelolanya jika perusahaan ini sudah merealisasikan seluruh konsesinya yang meliputi 7 desa di kecamatan Gane Barat Selatan, enam desa di kecamatan Gane Timur Selatan serta 7 desa di kecamatan kepulauan Joronga. Selain terkait lahan/wilayah kelola, masyarakat



Foto-foto: Dok. Ahmad Farid

juga kini telah menghadapi masalah sosial dan lingkungan sebagaimana yang mereka ungkapkan dalam pertemuan warga yakni sebagai berikut.

1. Enam anak sungai sudah hilang akibat tertutup urugan tanah oleh perusahaan. Dari keenam sungai yang hilang ini, empat diantaranya adalah sungai tadah hujan dan dua anak sungai bermata air.
2. Konflik internal di tingkatan warga mulai nampak, dengan munculnya kubu yang pro dan kontra terhadap kehadiran perusahaan.
3. Keresahan karena proses intimidasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang mengawal proses *land clearing*.
4. Petilasan Sangaji Gane telah digusur oleh perusahaan.
5. Biaya untuk ke kebun kini semakin meningkat, kini masyarakat harus membawa air dari kampung untuk keperluan di kebun dan keterbatasan air ini memaksa mereka harus pulang per dua hari dari biasanya seminggu. Biasanya untuk perjalanan pergi-pulang kebun menggunakan kendaraan motor, masyarakat membutuhkan lima liter BBM. Harga BBM per

liter adalah 12 ribu rupiah.

6. Debu dari aktivitas pembukaan lahan serta asap dari pembakaran kayu dan serasah selama proses *land clearing*.
7. Banyaknya pohon yang sudah ditebang perusahaan, kini warga kesulitan mendapatkan kayu untuk kepentingan domestiknya.
8. Pencurian kayu dan hasil kebun masyarakat (cabe dan pisang) kini sudah mulai terjadi. Kejadian pencurian ini sebelum beroperasinya perusahaan belum pernah terjadi.

Keteguhan sikap orang Gane

Ancaman yang sudah nyata dihadapi oleh masyarakat Gane tidak menyurutkan langkah mereka untuk mempertahankan kondisi wilayah kelolanya. Pro kontra yang terjadi di masyarakat, intimidasi yang berakhir di penjara beberapa orang masyarakat Gane, mereka pahami sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Namun jauh lebih penting dari itu, tanah *Tolagum* (warisan leluhur) harus mereka pertahankan.

Dalam upaya mempertahankan wilayahnya, mereka tetap mengusahakan hak atas wilayah kelolanya, upaya ini telah dikuatkan juga dengan salah satu butir kesimpulan Komnas HAM pada bulan Januari 2014 bahwa Masyarakat Gane Dalam dan sekitarnya adalah masyarakat adat dengan ciri mempunyai struktur adat, wilayah adat, tanah ulayat yang dikelola secara kolektif maupun perseorangan dan hukum adat yang masih dipatuhi oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 1/1999 Pasal 6. Sebagai masyarakat adat yang hidupnya sangat bergantung pada SDA, maka hal tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah maupun perusahaan ketika melakukan investasi.

Dalam menjaga dan mengembangkan model kelola wilayahnya, masyarakat juga melakukan berbagai upaya perbaikan lingkungan dan pengkayaan vegetasi berupa penanaman bakau di sepanjang pantai yang kondisi vegetasi mangrovenya sudah rusak, melakukan pembibitan tanaman ekonomi keluarga dan lain-lain.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Tulisan ini bersumber dari website Walhi dan dapat dibaca pada link <https://www.walhi.or.id/berebut-ruang-dengan-investasi>

Membincangkan **BANGGA** Papua

Oleh **SYAIFULLAH**

Sejak diluncurkan bulan November 2017, BANGGA Papua sudah melalui banyak hal. Ada beragam jejak yang ditinggalkan oleh program perlindungan sosial kontekstual Papua ini. Berbagai tantangan, rintangan, hingga praktik baik terlihat jelas dalam rentang tiga tahun pelaksanaan program. Berbagai pihak juga banyak terlibat dalam program ini. Mulai dari Sekretariat Bersama (Sekber) yang terdiri dari beragam unsur, tenaga kesehatan, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, hingga mitra pembangunan yang ikut membantu melancarkan pelaksanaan program.

Beragam cerita, baik tantangan maupun capaian tersebut terasa sangat penting untuk dibagikan. Baik kepada khalayak ramai maupun kepada pihak khusus yang dirasa potensial untuk mereplikasi program perlindungan sosial ini. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar ketika menggelar dua kegiatan membincangkan program BANGGA Papua.

Tantangan BANGGA Papua

“Program BANGGA Papua ini adalah hasil kolaborasi berbagai pihak,” kata Andri Damir dalam diskusi virtual bertajuk: BANGGA Papua: Bantuan Tunai Menjangkau Daerah Terpencil yang digelar hari Senin, 16 November 2020.

Andri Damir yang juga adalah Ketua Sekretariat Bersama BANGGA Papua Provinsi Papua memaparkan tentang prinsip dasar program BANGGA Papua. Program ini menyasar anak usia empat tahun ke bawah yang lahir dari kedua orang tua yang Orang Asli Papua, atau salah satunya Orang Asli Papua. Dana sebesar Rp200.000 per bulan ditransfer langsung ke rekening atas nama ibu atau wali yang sah melalui Bank Papua sebagai mitra. Sebelum memiliki buku rekening, para mama atau wali tentu saja harus memiliki dokumen kependudukan yang sah, utamanya Nomor Induk Kependudukan. Dana yang ditransfer tersebut wajib digunakan hanya untuk menjamin dan mendukung peningkatan gizi anak.



Para Mama penerima dana BANGGA Papua di depan Kanca Bank Papua di Tiom, Kab. Lanny Jaya dengan buku tabungan di tangannya. Dana yang diperuntukkan bagi kesejahteraan buah hati mereka ini diberikan kepada mereka melalui transfer rekening, agar mereka bisa menyimpan dan menggunakannya dengan baik.
Foto: Syaifullah /Yayasan BaKTI

Saat ini, pelaksanaan program baru diujicoba di tiga kabupaten yaitu: Asmat, Paniai, dan Lanny Jaya. Ketiga kabupaten tersebut menurut Andri Damir mewakili tiga wilayah adat yaitu *Anim Ha* (Asmat), *Mee Pago* (Paniai), dan *La Pago* (Lanny Jaya). Ketiga daerah tersebut termasuk daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Papua sehingga terasa sangat pas menjadi wilayah uji coba program BANGGA Papua.



Ketika menjelaskan tentang rangkaian kegiatan dan tahapan program BANGGA Papua, Andri Damir menekankan pentingnya verifikasi data penerima manfaat. Data tersebut diambil oleh anggota Sekber Kabupaten maupun pihak lain yang membantu pelaksanaan program. Pendataan dilakukan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Verifikasi data itu yang sangat penting untuk sebuah program perlindungan sosial,” katanya. Pemilihan NIK sebagai syarat utama

data penerima manfaat pada dasarnya memudahkan pelaksana program untuk memverifikasi data penerima manfaat. Tanpa NIK berarti mereka tidak bisa terdata sebagai penerima manfaat. Di sisi lain, keharusan memiliki NIK agar bisa menjadi penerima manfaat justru ikut berkontribusi meningkatkan jumlah kepemilikan NIK dan KTP bagi Orang Asli Papua.

Namun, proses mendata itu bukan proses yang mudah. Kondisi geografis menjadi tantangan utama. Sebagai contoh Paniai,



kabupaten di Pegunungan Tengah bagian barat Papua ini punya sembilan distrik yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan darat. Jalan kaki bisa memakan waktu berhari-hari, sehingga pilihan lainnya hanya helikopter carteran atau *speed boat* melintasi Danau Paniai. Hal yang hampir sama juga dialami oleh Kabupaten Asmat yang beberapa distriknya terletak sangat jauh dan butuh dana belasan hingga puluhan juta untuk sekali perjalanan pergi dan pulang.

“Ini jadi tantangan utama proses sosialisasi, pendataan, maupun pencairan dana,” kata Eli Yogi, Ketua Sekretariat Bersama BANGGA Papua, Kabupaten Paniai. Tantangan itu belum termasuk tantangan lain seperti adanya isu tentang perekaman KTP elektronik yang bertentangan dengan kepercayaan, atau bahkan gangguan dari pihak lain yang memiliki idealisme yang berbeda.

“Kalau untuk mereka, kita coba merangkul. Kita libatkan mereka dalam program,” kata Eli Yogi.

Apresiasi dari Bappenas

Pelaksanaan program BANGGA Papua memang tidak mudah. Papua dengan segala tantangan dan keunikannya membuat pelaksana program harus berpikir keras mencari model dan desain program yang tepat untuk konteks Papua.

(atas) Pengarahan kepada para mama saat proses pendaftaran calon penerima manfaat dan BANGGA Papua. (kanan) Proses verifikasi dokumen penerima manfaat sebelum pencairan dana oleh petugas Bank Papua. Pemerintah Provinsi Papua mempercayakan bank lokal untuk mendistribusikan dana ke daerah-daerah sulit di Papua.

Foto: Syaifullah /Yayasan BaKTI

Meski awalnya tidak mudah, namun akhirnya pelaksanaan program ini bisa berjalan selama dua tahun lebih dan memberikan banyak hal positif.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, Maliki memberikan apresiasi kepada program BANGGA Papua. Menurutnya, program ini merupakan contoh inovatif bagaimana sebuah program bisa memastikan masyarakat di daerah terpencil tetap mendapatkan akses perlindungan sosial. Menurutnya lagi, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mengintegrasikan sistem informasi BANGGA Papua dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Integrasi ini akan memungkinkan penerima manfaat mendapatkan perlindungan sosial yang komprehensif seperti Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, dan subsidi pemerintah lainnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Vivi Yulaswati



menambahkan bahwa, praktik baik dari BANGGA Papua memberikan pembelajaran yang penting untuk penyempurnaan program dan kebijakan perlindungan sosial nasional terutama dalam memperbaiki bisnis model dan melengkapi kerangka regulasi. Menurutnya, selama ini program nasional masih berkolaborasi dengan bank-bank nasional. BANGGA Papua memberi pelajaran bahwa distribusi dana ke daerah sulit sangat perlu untuk melibatkan bank lokal atau institusi penyedia keuangan di daerah tersebut.

Sharing Session dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat

Di kesempatan yang berbeda, Sekber BANGGA Papua Provinsi Papua membagikan pengalamannya mengelola dan menjalankan program BANGGA Papua dengan wakil dari Provinsi Papua Barat. Papua Barat yang diwakili oleh Asisten III Provinsi Papua Barat, Reymond Yap. SE, MTP dan beberapa orang stafnya mengaku tertarik untuk mengadopsi model perlindungan sosial seperti yang dikerjakan oleh BANGGA Papua.

“Kami butuh gambaran strategis dan masukan-masukan serta motivasi dari Pemerintah Papua yang sudah lebih dulu melaksanakan program perlindungan sosial kontekstual Papua,” kata Reymond Yap dalam sambutannya. Menurutnya

lagi, program perlindungan sosial kontekstual Papua memang sangat dibutuhkan agar program bisa tepat sasaran. “Tujuan kita adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia dan menekan jumlah kemiskinan di Papua Barat,” tambah Reymond Yap.

Setelah tiga tahun mengelola dan menjalankan program BANGGA Papua, Sekber BANGGA Papua Provinsi Papua memang sudah mendapatkan begitu banyak pengalaman. Mereka sudah paham betul beragam rintangan yang dihadapi baik ketika merancang dan merencanakan program, melakukan sosialisasi, hingga proses pendataan dan pencairan dana. Beragam pengalaman itulah yang coba dibagikan oleh Sekber BANGGA Papua Provinsi Papua lewat Andri Damir, ketua Sekber BANGGA Papua.

“Awalnya kita ‘berdarah-darah’ juga dalam menjalankan program ini. Tapi sekarang, semua sudah lancar karena kita sudah tahu celahnya,” kata Andri Damir.

Menurutnya, model pelaksanaan program BANGGA Papua ini memang didesain benar-benar sesuai dengan kontekstual Papua. Mulai dari jenis perlindungan sosial yang diberikan, hingga metode pelaksanaannya.

“Dulu kita pernah diprotes orang pusat. Katanya, kenapa tidak langsung saja bagi-bagi



susu untuk anak? Mereka tidak tahu kalau di Papua itu bukan hal yang gampang untuk membagikan bahan makanan. Kalau misalnya terjadi apa-apa pada anak mereka, misalnya mencecet-mencecet, bisa-bisa kita yang dituduh macam-macam,” kata Andri Damir.

Dalam pelaksanaan program, Sekber BANGGA Papua Provinsi Papua juga mengaku tidak bisa melupakan begitu saja peran para mitra pembangunan. Baik dari MAHKOTA, KOMPAK, Yayasan BaKTI, UNICEF, hingga Bank Papua. Para mitra dengan spesialisasinya masing-masing, ikut membagikan pengetahuan dan mendampingi Sekber BANGGA Papua dalam menjalankan program tersebut.

Kerjasama dengan mitra pembangunan ini melengkapi model kerja sama lintas sektor yang sudah ada dalam tubuh Sekretariat Bersama BANGGA Papua. Meski di tingkat Provinsi Papua Sekber berada di bawah kendali Bappeda Provinsi Papua, namun anggota Sekber berasal dari beragam dinas dan sektor yang ada di Provinsi Papua. Mulai dari Dukcapil, Dinas Sosial, hingga dinas lain yang juga terkait dengan perlindungan sosial.

Hal lain yang digarisbawahi adalah soal penganggaran dan regulasi. Menurutnya, desain program BANGGA Papua sudah melalui diskusi dan konsultasi yang intens dengan

Setelah tiga tahun mengelola dan menjalankan program ini, Sekber BANGGA Papua memiliki begitu banyak pengalaman. Mereka paham betul berbagai rintangan dan tantangan dalam proses sosialisasi, hingga proses pendataan hingga pencairan dana. Foto: Syaifulah /Yayasan BaKTI

bidang yang mengurus soal anggaran dan regulasi. Semua demi memastikan program berjalan lancar dan tidak sesuai dengan birokrasi pemerintahan.

“Kalau anggaran dan regulasi salah dari awal, maka saya yakin kalau pelaksanaannya juga pasti tidak akan lancar,” pungkas Andri Damir.

Apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua lewat program perlindungan sosial BANGGA Papua ternyata memang menginspirasi banyak pihak. Setelah tahun 2018 Pemerintah Provinsi Aceh berkunjung dan belajar ke Papua, maka sekarang Provinsi Papua Barat yang berniat untuk mereplikasi program perlindungan sosial tersebut. Bahkan, pemerintah pusat lewat BAPPENAS pun mengapresiasi pelaksanaan program BANGGA Papua. Sebuah hasil yang menggembirakan setelah masa pelaksanaan tiga tahun yang menguras banyak energi.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program BANGGA Papua, dapat menghubungi info@bakti.or.id

**IMAM KELURAHAN JONGAYA
KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR**

SURAT KETERANGAN NIKAH

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa yang tercantum namanya masing-masing dibawah ini :

Akta Nikah, Kertas yang Berat

Oleh:

M. GHUFRAN H. KORDI K. & MUH. TAUFAN RAMLI

A

da berbagai sistem hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia. Sistem hukum negara mengaturnya melalui Undang-Undang Pokok Perkawinan no. 1/1974 (diubah dengan UU no 16/2019). Namun hukum negara bukanlah satu-satunya acuan hukum bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinannya. Di samping hukum negara, ada pula hukum agama (tidak hanya agama-agama besar yang diakui negara, tetapi juga aliran kepercayaan yang seharusnya mendapat pengakuan yang sama dari sudut pandang hak asasi manusia), kemudian juga hukum adat, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang dianggap mengikat oleh para warga pendukungnya.

Undang-Undang Perkawinan tidak sepenuhnya dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dengan berbagai kondisi.

Misalnya pasal 2 (b) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal itu bahkan dirasa menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat tertentu yang akan melangsungkan perkawinannya, dan inilah salah satu hal yang menyebabkan alasan mengapa orang melakukan kawin kontrak, kawin siri, atau melakukan perkawinan tanpa perlu mengurus akta nikah.

Ketika orang akan melakukan transaksi hukum, dalam hal ini perkawinan, maka di hadapannya terbentang pilihan-pilihan hukum. Hukum mana yang akan dipilihnya akan sangat didasarkan pada perhitungan untung rugi. Orang yang melakukan kawin kontrak mengadakan acuan kepada beberapa sistem hukum untuk melegitimasi perkawinannya. Artinya terjadi adopsi atau *borrowing* terhadap unsur-unsur tertentu dari beberapa hukum yang berbeda, terutama adalah sistem hukum agama seperti hukum Islam, dan ada kebiasaan setempat. Dari berbagai kasus bahwa kawin kontrak juga dilakukan dalam rangka penghindaran terhadap hukum negara yang dirasakan tidak mampu diterobos.

Secara empiris, Undang-Undang Perkawinan tidak sepenuhnya dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dengan berbagai kondisi. Misalnya pasal 2 (b) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal itu bahkan dirasa menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat tertentu yang akan melangsungkan perkawinannya, dan inilah salah satu hal yang menyebabkan alasan mengapa orang melakukan kawin kontrak, kawin siri, atau melakukan perkawinan tanpa perlu mengurus akta nikah.

Akta Nikah, Kertas Mahal?

Setiap perkawinan harus dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (Capil), dan bukti dari pencatatan dan terbitnya Akta Nikah. Dengan demikian, mereka yang sudah menikah dapat menunjukkan akta nikah

atau surat nikah yang diterbitkan oleh lembaga negara, KUA bagi yang beragama Islam, dan Capil bagi selain Islam. Demikian juga bagi yang telah bercerai tentu mempunyai Akta Cerai.

Namun faktanya tidak semua yang telah menikah mempunyai akta nikah. Demikian juga mereka yang telah bercerai, tidak selalu mempunyai akta cerai. Pasangan suami-istri dari keluarga miskin atau perkawinan yang dilakukan dengan tidak mengikuti hukum negara atau Undang-Undang Perkawinan, maka pelaku perkawinannya tidak mempunyai akta nikah.

Pada ujicoba pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, dimana Yayasan BaKTI adalah mitra UNICEF dan Bappenas, dalam wawancara dengan warga yang tidak mempunyai akta nikah dan akta cerai, diketahui bahwa, urusan terkait dengan penerbitan dua surat tersebut dianggap berat karena mahal dan berliku-liku.

Perempuan bernama Anti P. (32) yang tinggal di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang saat ini telah mempunyai 4 anak, adalah perempuan yang tidak mempunyai akta nikah. Dia pernah mempunyai surat keterangan kawin/nikah yang diurusnya di kantor kelurahan setempat, namun surat tersebut telah terbakar di tempat tinggal sebelumnya. Pada waktu kawin, Anti P tidak mencatatkan perkawinannya di KUA dengan alasan tidak ada uang. Perkawinan Anti dan suaminya dilakukan secara Islam dan dikawinkan oleh Imam masjid.

Perempuan lainnya bernama Sina (28) justru menunjukkan surat keterangan kawin/nikah yang ditandatangani oleh lurah. Untuk mendapatkan surat keterangan tersebut, Sina harus membayar 400 ribu rupiah kepada orang yang disebutnya sebagai 'orang kelurahan'. Surat keterangan kawin dari kantor kelurahan dibutuhkan oleh Sina dan suaminya untuk mengurus akta kelahiran anak pertamanya yang akan masuk sekolah.

Sedangkan Asmi (21) adalah perempuan yang kawin di usia anak atau perkawinan anak. Asmi berusia 14 tahun saat menikah. Asmi dan suaminya juga tidak mendaftarkan nikahnya di KUA. Prosesi perkawinan dilakukan secara Islam yang dipimpin oleh seorang imam masjid. Belakangan Asmi dan suaminya mengurus surat keterangan kawin di kantor kelurahan dengan membayar kepada calo sebesar 600 ribu rupiah.

Menurut Anti, Sina, dan Asmi, keluarga miskin lebih memilih melangsungkan perkawinan dengan tidak mendaftarkannya di KUA karena prosedur yang dianggap berbelit-belit, banyak persyaratan seperti harus melampirkan KTP, Kartu Keluarga, foto, dan biayanya mahal. Persyaratan yang berat dan prosedur yang berbelit-belit ini tentu memberatkan bagi keluarga miskin. Akibatnya Akta Nikah dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan, walaupun sangat diperlukan.

Tanpa Akta Nikah, Perempuan Dirugikan

Fifi (37) tidak mempunyai akta nikah ataupun surat keterangan nikah. Fifi telah berpisah dari suaminya. Suaminya telah menikah lagi. Namun status perkawinan Fifi masih tidak jelas. Walaupun suami telah menyatakan cerai, namun Fifi tidak mempunyai akta cerai atau surat keterangan lain yang menjelaskan bahwa ia telah diceraikan oleh suaminya.

Tetangga, keluarga, bahkan Fifi sendiri bingung dengan statusnya, apakah sebagai istri orang atau janda. Fifi tidak mempunyai dasar atau pegangan untuk menunjukkan kepada keluarga dan orang lain bahwa, dirinya adalah istri orang atau sebagai seorang janda. Tentu Fifi juga tidak bisa mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama terhadap suaminya, karena Fifi tidak mempunyai Akta Nikah.

Kasus seperti Fifi tentu banyak terjadi di berbagai tempat, yang dialami oleh perempuan

miskin atau perempuan yang menikah sirri, kawin secara adat, atau perkawinan lainnya yang tidak tercatat atau tidak sesuai dengan hukum negara.

Perkawinan Siri, yang Tidak Tersembunyi

Perkawinan yang dilakukan oleh Anti, Sina, Asmi, dan Fifi adalah perkawinan yang tidak didaftarkan di KUA atau Capil, yang dikategorikan sebagai perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan. Perkawinan siri biasanya adalah perkawinan yang dirahasiakan, tidak diumumkan ke publik. Perkawinan yang calon mempelainya masih di bawah umur atau perkawinan dimana perempuan menjadi istri kedua, ketiga, dan seterusnya, sering dirahasiakan.

Namun, Anti, Sina, Asmi, dan Fifi melangsungkan perkawinan secara terbuka dan dilaksanakan dengan acara resepsi sederhana. Pasca perkawinan, Anti, Sina, dan Asmi mengurus surat keterangan kawin di kelurahan, yang juga merupakan institusi atau lembaga negara.

Beberapa studi menyebutkan, perkawinan kontrak dan perkawinan siri dilaksanakan sebagai suatu strategi untuk dapat melangsungkan perkawinan tanpa risiko sebagaimana bila perkawinan dilakukan dengan pencatatan negara. Perkawinan siri dilakukan sebagai penghindaran terhadap berbagai konsekuensi yang melekat dalam perkawinan negara. Prosedur administrasi yang dirasakan berbelit-belit juga merupakan salah satu alasan mengapa perkawinan siri dilakukan. Perkawinan siri juga merupakan strategi perempuan dalam melepaskan diri dari suami, bila dalam perkawinan terjadi kekerasan. Namun, perkawinan siri yang dilakukan sebagai penghindaran terhadap hukum negara, sangat terlihat pada mereka yang menikah sebagai istri kedua atau lebih.

Di masyarakat miskin, perkawinan juga dilakukan dengan tidak mendaftarkan pada negara atau melakukan penghindaran hukum negara yang dianggapnya mahal dan berbelit-belit. Namun, perkawinan keluarga miskin ini juga akhirnya diakui oleh negara, sebagaimana penerbitan surat keterangan kawin dari kantor lurah dan penerbitan akta kelahiran kepada anak-anak dari perkawinan tersebut.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program Kerjasama Unicef dan Yayasan BAKTI, dapat menghubungi info@bakti.or.id

S

etelah memasuki minggu-minggu *Sustainable Development Course*, Kamis adalah hari di mana peserta program INSPIRASI 2019 melakukan *visit* atau kunjungan ke lembaga atau organisasi maupun individu yang berkaitan dengan minat belajar (*special interest*) masing-masing. Hari itu saya mempunyai dua jadwal kunjungan. Di Pagi hari saya harus mengunjungi salah satu lembaga advokasi lingkungan hidup pada jaringan internasional, Greenpeace New Zealand yang kebetulan bermarkas di Mount Eden, Kota Auckland. Lalu pada siang hari saya harus bertemu dengan aktivis-aktivis lingkungan remaja yang menyebut komunitas mereka *Para Kore Ki Tamaki* atau komunitas *Zero Waste* Auckland di *Western Springs College*.

Untuk tiba di kantor Greenpeace, pagi itu, seperti pada hari kuliah biasa saya harus menggunakan kapal *Ferry* ke *City Center* (pusat kota) selama 30 menit dari Hobsonville, sebuah

wilayah *suburban* tempat saya tinggal bersama *host family*. Sesampainya di *Downtown Ferry Terminal, City Center*, saya kemudian berjalan kaki lagi sekitar 10 menit ke stasiun Britomart dan menaiki bus nomor 27H tujuan 11 Akiraho Street, Mt. Eden Auckland. Demikian alamat kantor Green Peace New Zealand yang ditulis Caroline Novak, *mentor coordinator* kami di email saya.

Saya tiba sekitar 3 menit lebih awal dari seorang rekan saya Alfian, yang kebetulan memiliki jadwal kunjungan yang sama. Ketika diijinkan untuk masuk sebagai tamu ke dalam, hal pertama yang kami kagumi adalah sistem keamanan yang dimiliki lembaga tersebut. Segalanya berbasis teknologi yang canggih dan cukup ketat. Saya pikir sangat wajar untuk lembaga advokasi sekaliber Greenpeace untuk memiliki *security system* yang ketat dan canggih sebab mereka merupakan lembaga advokasi yang cukup vokal dalam menyuarakan keadilan lingkungan di Negeri Kiwi tersebut. Lawan mereka adalah korporasi dan pemerintah nakal

Sebuah Catatan dari Kamis

Oleh **RIMA MELANI BILAUT**

GREENPEACE





Foto: Google Image

Lima hal penting dalam menyusun sebuah taktik kampanye

- 1 **Tujuan kampanye.** Tetapkan apa yang menjadi tujuan kampanye.
- 2 **Target.** Tentukan siapa yang memiliki *power* resmi untuk memenuhi apa yang kita inginkan.
- 3 **Pemetaan Aktor.** Kenali apa yang memotivasi mereka? Siapa mereka? Apa yang menahan mereka melakukan aksi yang kita harapkan? Hal apa saja yang mempengaruhi mereka.
- 4 **Taktik.** Susun taktik yang akan digunakan dalam menyampaikan pesan dan berkomunikasi serta media apa yang akan digunakan.

yang sistem intelegensinya mungkin agak jauh di atas Indonesia.

Seusai mengisi daftar tamu pada komputer yang disediakan, kami langsung disambut oleh Steve Abel, seorang *senior campaigner* Greenpeace New Zealand yang ditugaskan untuk menemani kami belajar hal-hal yang ingin kami pelajari dari lembaga ini selama kurang lebih dua jam. Hal pertama yang dilakukan Steve Abel ketika menyambut kami adalah membawa kami ke dapur Greenpeace dan mempersilahkan kami membuat minuman kami sendiri. Untuk sampai ke dapur kami melewati ruang kerja yang cukup sibuk saat itu. Beberapa orang berada di meja kerjanya, menatap laptopnya masing-masing. Ada juga yang tengah membentuk kelompok diskusi kecil.

Di Dapur kami bercakap dengan seorang *Campaigner* Perempuan, Holly Dove. Kalau tidak salah kami membicarakan terkait kaitan perusahaan pertambangan di New Zealand dan bagaimana dampak advokasi *Greenpeace* terhadap nasib buruh yang bekerja di sana. Kebetulan Holly sedang mengadvokasi sebuah kasus tambang migas di salah satu pulau terpencil di Utara New Zealand. Sayangnya pembicaraan kami dengan Holly tidak terlalu lama sebab Steve mengajak kami untuk turut serta dalam sebuah rapat perencanaan kampanye bersama tim kampanye laut di ruangan bawah.

Sungguh sebuah kesempatan yang menarik pikir saya waktu itu. Karena rapat tersebut cukup rahasia, saya tidak akan menceritakan secara detail terkait strategi apa yang mereka susun saat itu dengan sangat *well organized* di sini. Intinya

yang mereka lawan dalam kampanye tersebut adalah sebuah perusahaan perikanan bernama Tally yang telah mencemari laut dengan limbah plastik. Mereka memanfaatkan momen *Halloween* untuk menjalankan taktik yang akan mereka gunakan seperti biasa, menebarkan baliho besar bertuliskan *Ghost Kill* diatas gedung perusahaan tersebut, ciri khas Greenpeace. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator kampanye laut (*Ocean Campaigner*), Jessica Desmond, yang masih sangat muda tapi sudah bergelar Master Biologi dari Harvard dan beberapa orang dari tim *fundraising* dan tim komunikasi.

Setelah rapat selesai, saya dan Jessica sempat membahas tentang sebuah rencana kebijakan internasional yang akan mengijinkan pertambangan minyak di lautan lepas. Jessica sangat tidak menyetujui hal tersebut, baginya itu adalah sebuah bencana Internasional bagi laut dunia. Untuk itu ia akan terlibat dalam sebuah konferensi tingkat internasional untuk turut menolak kebijakan tersebut. Sialnya, karena banyak informasi yang mengalir waktu itu saya lupa mencatat nama lembaga yang akan menetapkan kebijakan itu dan nama konferensi yang akan diikuti Jessica. Kami berbincang cukup lama dan sempat berswafoto bersama dengan latar stasiun kereta Mt. Eden yang berada persis di belakang kantor Greenpeace.

Pada akhir kunjungan tersebut, Steve kemudian mengajak kami ke ruangan pertemuan bersama tim kampanye laut tadi dan membahas tentang kampanye untuk advokasi. Perbincangan kami berujung pada kuliah singkat yang Steve berikan sebagai seorang senior

campaigner. Ada lima hal penting dalam menyusun sebuah taktik kampanye menurut Steve yang sempat saya catat (lihat box)

Menjelang jam makan siang, saya meninggalkan kantor Greenpeace menuju Mt. Albert. Di sana Phia dan Waita sudah menunggu untuk bertemu *rangatahi* (remaja-remaja) Para *Kore Ki Tamaki* di *Western Spring College*. Di sana kami bertemu dengan sekelompok remaja perempuan yang terlibat dalam beberapa protes seperti Climate Strike dan IHUMATAO (sebuah kasus tanah masyarakat adat kala itu). Mereka mendirikan komunitas dan terlibat aktif dalam kampanye gaya hidup *zero waste*. Anak-anak ini mengingatkan saya pada Salsabila Khairunisa di Indonesia yang aktif berkampanye isu lingkungan sejak usia remaja.

Dalam percakapan santai sambil menikmati cemilan *duritos* dan roti, kami memperkenalkan diri masing-masing dan secara bergiliran menyampaikan kenapa terlibat dalam dunia aktivisme untuk lingkungan hidup. Saya cukup kagum melihat antusiasme mereka dalam menyampaikan jawaban-jawaban mereka.

“Alam adalah rumah”.

“Menjaga lingkungan berarti menjaga *Papatuanuku* (Ibu Bumi) dan *Ranganui* (Langit)”.

“Alam adalah titipan generasi masa depan”.

“Tidak ada masa depan bagi bumi yang rusak”.

“Kita tidak punya banyak waktu lagi, perubahan iklim itu nyata”.

Alasan-alasan yang cukup sederhana namun tidak sesederhana keaktifan mereka dalam aktivisme lingkungan.

Saya kemudian merefleksikan beberapa hal yang mungkin mendorong mereka sehingga cukup aktif berpartisipasi dengan kesadaran yang tinggi. Pertama, jika dilihat dari tingkat literasi, akses terhadap informasi dan budaya membaca di negara tersebut sangat tinggi. Kedua, mereka telah dibiasakan oleh orang tua untuk hidup dengan alam dan kesadaran terhadap keselamatan lingkungan hidup sudah dibangun dari rumah sebelum mereka masuk ke sekolah. Ketiga, budaya Maori yang cukup kuat. Maori adalah masyarakat asli di New Zealand yang hubungan spiritualitasnya dengan alam cukup



tinggi. Keempat, sekolah mendukung setiap aktivitas siswa tersebut. Sistem pendidikan di New Zealand bahkan menerapkan kurikulum yang mengintegrasikan isu keberlanjutan lingkungan ke dalam setiap mata pelajaran. Dengan demikian, setiap mata pelajaran yang diterima dan dipelajari di dalam maupun luar kelas selalu menanamkan informasi dan kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup demi mencapai keberlanjutan.

Jika dikaitkan dengan *Theory of Engagement* milik Niki Harre, Profesor Psikologi di University of Auckland, keempat hal tersebut telah berhasil menanamkan suatu nilai yang sama di dalam anak-anak tersebut. Kunci utama dari keterlibatan seseorang terhadap suatu isu sosial adalah karena mereka memiliki nilai yang kuat terhadap isu tersebut. Nilai yang kuat ini jika dimiliki oleh banyak orang, bayangkan keterlibatan massa dalam suatu aksi jika seorang *campaigner* menyasar dengan tepat nilai tersebut dalam pesan kampanyenya.

Mendaki Mt. Eden Summit, di samping belajar

Satu setengah jam kemudian, Phia dan Waita mengantar saya di stasiun Mt. Albert dan dari sana saya akan naik kereta untuk kembali ke *City Center*. Sungguh satu hari yang cukup panjang bagi saya. Banyaknya informasi yang saya terima sepanjang hari cukup menyiksa otak saya. Saya belum sempat makan siang. Waktu sudah pukul 13.45 siang. Saya pun memutuskan turun kembali di stasiun Mt. Eden dan mencari makan siang. Kebetulan ada sebuah warung *fish and chips* yang tidak jauh dari kantor Greenpeace. Saya membeli makan siang di sana dan berencana untuk menyantapnya di puncak Mt. Eden Summit.



(kiri) Bersama Jessica Desmond. (kanan) Para Kore Ki Tamaki
Foto: Dok. Rima M. Bilaut

Mt. Eden Summit adalah satu dari 200-an gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi di Auckland dan menjadi salah satu *spot* wisata yang terkenal. Untuk sampai ke sana dari titik saya membeli makan siang diperlukan waktu sekitar 20 menit. Sekalipun cuaca sudah mulai terik kembali, pohon-pohon besar yang rindang menyelamatkan saya dari sengatan radiasi ultraviolet yang katanya intensitasnya lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Hal ini dikarenakan New Zealand sangat dekat dengan lokasi penipisan lubang ozon. Tak heran semua orang akan menggunakan kacamata ketika keluar dari rumah. Jadi bukan untuk gaya-gayaan, mengingat dampak dari radiasi sinar UV dapat menyebabkan katarak, maka mereka disarankan untuk menggunakannya. Penjelasan ini saya peroleh dari Barry Griben, seorang dokter sekaligus suami dari Laila Harre (Manager Program INSPIRASI) ketika saya terkena iritasi mata di beberapa minggu pertama tinggal di Auckland.

Selain pohon-pohon yang melindungi saya, kicauan burung native juga turut menemani saya dalam pendakian ke puncak Mt. Eden. Dari sekian jenis burung asli di New Zealand, saya hanya mengenal satu kicauan, yakni kicauan dari burung Piwakawa-kawa (semacam burung gereja). Burung tersebut merupakan jenis burung favorit Ezra, anak pertama *host family* tempat saya tinggal. Bagaimana tidak, hampir setiap *weekend* Stephen, ayahnya, akan membawa kami berjalan kaki atau bersepeda di bawah rimbunan pohon untuk sekedar melihat burung tersebut.

Mendekati puncak, saya melihat banyak mobil pariwisata berparkiran. Sepertinya

keadaan di puncak cukup ramai. Saya mulai bertemu dengan wisatawan-wisatawan asing yang didominasi oleh orang-orang Asia. Sepertinya orang Asia sangat menyukai kota ini. Selain wisatawan, 40 persen dari penduduk di Kota Auckland adalah orang Asia. Keberadaan orang Asia juga memengaruhi wisata kuliner yang ada di Auckland. Kuliner-kuliner Asia cukup mendominasi di sana. Ini juga yang membuat saya tidak terlalu *homesick* dengan makanan dari Indonesia. Sekalipun rasanya jauh berbeda, saya masih bisa menikmati Nasi Goreng pedas Malaysia, hingga Bakso dan Mie Ayam.

Sesampainya di Puncak, cepat-cepat saya menghabiskan *fish and chips* saya sudah cukup dingin lalu menikmati pemandangan kota Auckland hanya untuk tidak percaya bahwa saya benar-benar berada di sana. Pasalnya Auckland telah menjadi salah satu kota impian yang ingin saya datangi sejak 2018 selain London di Inggris dan Edinburgh di Scotlandia.

Setelah tinggal selama hampir empat bulan, bagi saya Auckland adalah kota dimana saya bebas menikmati petualangan seorang diri ke setiap sudut-sudutnya. Kota yang membuat saya untuk tidak sedikit pun takut kalau-kalau tersesat, bahkan sejak hari ketiga memijakan kaki di atasnya. Kota yang hanya memberikan saya *culture shock* pada persendian lutut karena terlalu banyak berjalan kaki. Kota di mana kebebasan melangkah dan berpikir hanya milik saya seorang. Semoga nanti bisa ke sana lagi.

Atau mungkin liat London dan Edinburgh dulu ya. Tapi terserahlah ke mana angin membawa saya (ceilah!). Untuk itu saya selalu termotivasi dengan kalimat yang di sampaikan Nadhira, seorang dokter perempuan muda Indonesia, lulusan Harvard "*Dream high! Because Our only limit is our mind*". Bermimpilah dengan tinggi, karena satu-satunya yang membatasi kita adalah pikiran kita sendiri. Tidak apa dibilang tidak realistis, tapi saya selalu percaya dengan kekuatan mimpi dan bahwa setiap orang berhak untuk punya mimpi.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Alumni INSPIRASI (2019), Deputi dan Campaigner WALHI NTT, Pendamping Sahabat Alam NTT, dan Founder Komunitas Beta Guru Kimia Hijau.

Artikel ini bersumber dari: <https://rimaistryingtowrite.blogspot.com/2020/10/catatan-belajar-dari-kamis-24-oktober.html?m=1>

Melawan Tradisi “Culik Perempuan” di Sumba

Bagian II

Oleh **MARTHA HEBI**

Yang Menolak Tunduk pada Tradisi

Chatty Hari Sabakodi (30 tahun) lulus sarjana dari salah satu perguruan tinggi di Kupang, Ibu kota Provinsi NTT. Dia bertugas sebagai pendamping kelompok Program Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) di salah satu desa di Kabupaten Sumba Tengah. Program ini berupa bantuan tunai kepada setiap desa untuk pengembangan ekonomi produksi yang diluncurkan pada masa Gubernur Frans Lebu Raya memerintah. Ia tidak menduga sama sekali akan menjadi korban yappa maradda. “Kejadiannya tanggal 10 Januari 2017. Sebelum itu ada telepon dari desa, katanya akan ada pemeriksaan dari inspektorat. Mereka mau periksa keuangan di Koperasi Anggur Merah. Jadi saya ke desa tanpa curiga sama sekali,” kenang Chatty.



Seperti biasa Chatty naik sepeda motor. Di jalan ia berpapasan dengan kepala desa. Dalam hati ia bertanya, kenapa kepala desa malah meninggalkan kantor desa? Bukankah ada pemeriksaan dari inspektorat? “Beliau bilang ada keperluan di kantor kecamatan,” ujar Chatty. Karena itu Chatty langsung mengarahkan motornya ke rumah bendahara desa. Belakangan baru Chatty tahu bahwa sang kepala desa menghindar karena tidak mau peristiwa yappa terjadi di rumahnya. Sementara bendahara desa, kata Chatty, tidak tahu sama sekali tentang rencana jahat itu.

Di rumah bendahara sudah hadir seorang staf dari inspektorat. Ia memakai seragam dinas. Mereka berdiskusi. Chatty melaporkan detail pengeluaran keuangan serta bukti print dari buku rekening. Hanya saja dirinya agak curiga, staf inspektorat hanya mencatat di atas selembarnya kertas. Biasanya mereka mencatat di atas kertas dengan format standar. “Setelah pemeriksaan, staf inspektorat tanya-tanya sama saya. Dia tanya asal saya dari mana, jadi saya bilang dari Malinjak. Saya juga heran, padahal kami sudah saling kenal, kenapa tanya asal-usul segala? Lalu di akhir obrolan, dia bilang ‘wah berarti ini ana loka (anak om)’. Saya diamkan saja. Saya hanya ambil foto kegiatan dan *share* ke *group* pendamping Anggur Merah. Ada kawan yang tanya, kenapa pemeriksaan hanya di desa saya saja?” ujar perempuan muda ini.

Selesai pemeriksaan, staf inspektorat mengajaknya ke kantor desa untuk menandatangani dokumen hasil pemeriksaan. Namun karena membawa sepeda motor, Chatty memutuskan untuk naik motor saja. Saat akan menghidupkan motor itulah, tiba-tiba sekelompok laki-laki meringkus dan membawanya masuk ke dalam mobil yang sudah disiapkan. Helm masih di kepalanya. “Ada lima laki-laki yang tangkap saya. Mereka pegang saya punya kaki, tangan dan kepala, lalu mereka muat dengan paksa ke mobil. Saya menangis berteriak dan meronta. Saya langsung sadar, ‘oh ini sudah yang namanya yappa’. Tidak lama kemudian, kami sudah tiba di Kampung Anajiaka. Orang sudah banyak yang berkumpul,” cerita Chatty.

Chatty diturunkan dari mobil. Helmnya dibuka. Dia sempat memberontak dan menggigit tangan seorang laki-laki yang menahannya. Ia

menusukkan kunci motornya ke dahi laki-laki yang lain sampai berdarah. Ia ditarik masuk ke pintu rumah adat keluarga besar pelaku yappa. Beberapa orang sudah menanti dan memercikkan air ke dahinya. Chatty menghindar. “Saya ingat orang tua dulu cerita, kalau kena air itu, kita hilang kesadaran dan bisa mengatakan iya atau setuju dengan keinginan keluarga yang yappa. Katanya ada jampi-jampi dalam air. Untung tidak kena di testa (dahi) saya,” kisah Chatty yang ketika peristiwa itu terjadi, dua hari lagi akan dipinang kekasihnya.

Chatty menangis sejadinya. Ia marah dan berteriak dari atas rumah adat keluarga besar laki-laki itu. Dia ingat bahwa lelaki pelaku yappa adalah sepupu dari staf inspektorat tadi. Lelaki itu adalah mantan pacarnya saat masih SMA hingga tahun pertama mereka kuliah di Kupang. “Kami dulu pacaran memang, tapi sudah putus. Sekitar 8 tahun lalu. Dari segi adat, dia pantas untuk ‘ambil’ saya jadi istri karena dia anak tante saya. Tapi, saya tidak suka dengan caranya dia. Kenapa tidak omong baik-baik? Dia juga orang mengerti. Lulus sarjana juga,” kata Chatty.

Beruntung, Chatty sempat mengirim pesan pendek (SMS) kepada orang tua dan tunangannya sebelum HPnya disita. Ia bilang kepada mereka, sudah terkena yappa, minta dibebaskan. “Saya bilang, bagaimana pun caranya tolong bebaskan saya. Saya tidak mau diperistri dengan cara yappa. Apalagi saya tidak cinta sama itu laki-laki,” ujarnya. Pesan yang sama ia kirim juga ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumba Tengah, dengan maksud agar mereka turun tangan menyelamatkannya. Namun, dinas tidak merespons sama sekali sampai dia bebas.

Keluarga pelaku sudah mengirim wunang untuk menemui orang tua kandung Chatty. Sesuai adat setempat, mereka membawa kuda. Tapi, kedua orang tua Chatty tidak menerima. Artinya mereka menolak keinginan keluarga laki-laki. Keluarga besar pelaku mulai melancarkan rayuan. Chatty dinasehati agar mau menerima ‘lamaran’ yappa ini. Bagaimana pun, kata para perayu, mereka masih keluarga dekat. Chatty menolak dengan tegas. Selama dua setengah hari, Chatty menolak makanan dan minuman yang disajikan oleh keluarga besar di kampung Anajiaka.

Di halaman rumah telah menyeruak keramaian layaknya pesta perkawinan besar. Gong dan tambur ditabuh kencang. Babi-babi disembelih untuk menjamu kerabat dan warga yang berkumpul. Ratusan orang berbincang ramai. Chatty kalap. Ia kembali berteriak-teriak minta dibebaskan. Akhirnya, di batas kesabarannya ia menyakiti dirinya. Ia mencabuti rambutnya. Menikamkan kunci motor ke tubuhnya. Kepalanya ia benturkan ke tiang rumah sampai benjol besar. “Pilihan saya adalah bebas atau saya mati. Itu saja!” cetus Chatty. Ia bersikukuh menolak!

Pada hari ketiga, ada tradisi purung tana. Artinya Chatty dianggap telah sah menjadi bagian dari keluarga besar lelaki itu. Urusan adat bisa dilanjutkan dan ia boleh keluar dari rumah meskipun masih dikawal ketat. Kampung Anajiaka masih riuh dengan gong dan tambur, dan babi-babi terus disembelih. Pesta belum usai. “Waktu itu ada ibadah, yang pimpin Ibu Pendeta Fin Fanggidae. Saya heran kenapa gereja seperti setuju. Tapi, Ibu pendeta bicara empat mata dengan saya. Dia minta maaf. Dia bilang awalnya dia menolak pimpin ibadah karena tidak setuju dengan adat ini. Namun tidak ada aturan yang melarangnya, dan ini merupakan wilayah pelayanannya. Ibu pendeta janji akan bicarakan ini dengan pemerintah agar ada peraturan desa (yang melaranggappa),” kata Chatty.

Di sisi lain kasus Chatty di-yappa menjadi *trending topic* di media sosial. Pro dan kontra terjadi. Pihak yang pro dengan tradisi ini mengobrak-abrik kehidupan pribadi Chatty. Pada hari ketiga, Chatty bertemu langsung dengan si pelaku. Chatty marah dengan tindakannya. Kata Chatty, pelaku hanya bilang, “mau bagaimana lagi, kalau omong baik-baik kau tidak mau.” Padahal, kata Chatty, pelaku dan dirinya tidak pernah lagi berbicara tentang hubungan mereka sejak putus dahulu. Atas persetujuan orang tuanya, keluarga Chatty melaporkan kasus ini ke Mama Salomi, Foremba. “Om pergi lapor ke Foremba. Terus Mama, Bapa sama-sama dengan Mama Salomi pergi lapor ke polisi. Waktu itu Kepala Desa Wailawa, Pak Alex juga bantu kami untuk negosiasi dengan keluarga Anajiaka,” jelas Chatty.

Pada hari ketiga keluarga Chatty mengirimkan utusan ke Anajiaka untuk

menyampaikan bahwa mereka tidak setuju dengan yappa. Keluarga Chatty menyampaikan bahwa Chatty mengancam akan bunuh diri kalau keluarga menyetujui dia diperistri oleh pelaku. Keluarga tidak mau mengorbankan Chatty.

Selama lima hari di Kampung Anajiaka, Chatty dijaga ketat. Untunglah dia boleh menerima kunjungan dari kawan kerja, kawan SMA dan keluarga. Malam hari delapan orang lelaki menjaganya. Bahkan hingga ke kamar kecil, ia dikawal. Pada malam keenam, orang tua Chatty, pihak kepolisian, Foremba dan keluarga besarnya datang ke Kampung Anajiaka untuk menjemput anak mereka. Chatty diminta untuk menyampaikan isi hatinya apakah dia mau atau tidak. Chatty dengan tegas menyatakan tidak mau diperistri oleh pelaku. Dirinya mau pulang ke rumah orang tuanya. Malam itu juga Chatty pulang bersama keluarganya, meskipun keluarga pelaku minta untuk menunda kepulangannya esok hari, karena sudah malam.

Paska peristiwa itu, Chatty masih bertemu dan menyapa staf inspektorat yang “menjebak”nya di atas tapi tidak direspons. Ketika bertemu keluarga pelaku, Chatty tetap menyapa mereka dengan sopan. “Saya rasa bagaimana e..., kami kan masih berkeluarga. Jadi saya tetap bangun hubungan baik. Mungkin mereka juga korban dari sistem sosial yang ada. Apa yang menimpa saya ini terjadi juga pada perempuan lain, hanya saja mereka tak berdaya untuk menolak,” ujar Chatty.

Sekembalinya ke rumah, orang tua Chatty bersama keluarga besar menyelenggarakan syukuran atau dalam tradisi Sumba disebut balingu hamaghu (mengembalikan jiwa yang hilang). Peristiwa itu dianggap sebuah malapetaka dan Chatty lolos dari sana.

Pada tahun yang sama ketika Chatty di-yappa, ada dua perempuan lain yang ditimpa kasus serupa. Keduanya juga lolos. Mereka menolak tunduk pada tradisi ini. Chatty kini sudah menikah dengan tunangannya. Mereka tinggal Sumba Barat Daya. Seorang anak telah menyempurnakan kebahagiaan mereka. (*Selesai*)

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis, dari Komunitas Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN) Sumba, dan tinggal di Waingapu Sumba Timur. Artikel ini bersumber dari <https://pgi.or.id/melawan-tradisi-culik-perempuan-di-sumba/>

Menjangkau Kelompok Terakhir BABS: Potret dari Sulawesi Selatan

Oleh **MUH. SALEH JASTAM**



istilah *last mile* atau kelompok terakhir pada mulanya dipakai di bidang telekomunikasi. Pada perkembangannya, istilah *last mile* mulai digunakan pada manajemen rantai suplai. Proses pengangkutan barang melalui jaringan kereta barang maupun kapal kontainer seringkali merupakan cara pengiriman yang paling efisien dan hemat biaya. Namun, ketika barang tiba di stasiun barang atau pelabuhan berkapasitas tinggi, barang tersebut kemudian harus diangkut lagi ke tujuan akhir. Bagian terakhir dari rantai suplai inilah yang sering kurang efisien. Nilainya bisa mencapai 28 persen dari total biaya untuk memindahkan barang. Ini kemudian yang dikenal sebagai ‘masalah *last mile*’.





Berdasarkan data website STBM pada 30 November 2020 masih terdapat 11 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang belum mencapai ODF. Kabupaten tersebut yaitu Pangkep, Maros, Jeneponto, Tona Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara, Luwu Utara, Bone, Takalar, Bulukumba, dan Kota Makassar.

Dalam upaya Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, masalah kelompok terakhir ditengarai menjadi batu sandungan dalam pencapaian *Open Defecation Free* (ODF). Adanya kelompok-kelompok warga dalam suatu wilayah yang sulit dijangkau dengan pendapatan dan pendidikan yang cukup rendah, serta kondisi rumah yang kurang layak, menjadi pemicu warga tidak memiliki jamban, sehingga menjadikan wilayah tersebut lambat mencapai ODF. Berdasarkan data website STBM pada 30 November 2020 masih terdapat 11 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang belum mencapai ODF. Kabupaten tersebut yaitu

Pangkep, Maros, Jeneponto, Tona Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara, Luwu Utara, Bone, Takalar, Bulukumba, dan Kota Makassar. Pada kabupaten yang belum ODF tersebut, pemerintah daerah masing-masing telah mengalokasikan anggaran secara berkelanjutan untuk percepatan akses jamban melalui kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pemicuan *Community Led Total Sanitation* (CLTS), dan sosialisasi program Lima Pilar STBM pada semua lapisan masyarakat.

Program Pencapaian Akses Jamban

STBM masih menjadi program unggulan untuk mencapai akses jamban di Indonesia. Pendekatan dan paradigma pembangunan sanitasi di Indonesia yang dipakai oleh STBM yaitu mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku. STBM diadopsi dari hasil uji coba CLTS yang telah sukses dilakukan pada beberapa lokasi proyek sanitasi dan air bersih di negara berkembang. Prinsip kerjanya mendorong kesadaran masyarakat untuk mengubah perilaku BABS menjadi buang air besar di jamban yang memenuhi syarat kesehatan.

Selain STBM, program bantuan fisik dari dana desa menjadi program andalan dalam



pencapaian akses jamban. Program Dana Desa yang diluncurkan pemerintah pusat sejak tahun 2015 membawa dampak positif maupun negatif. Jika dana desa dimanfaatkan secara baik sebagai stimulus untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat desa maupun bantuan sarana prasarana kesehatan, maka ini dapat berdampak positif. Namun jika dilakukan tidak secara partisipatif dan kreatif, maka program bantuan bisa berdampak negatif. Program bantuan dari pemerintah desa kepada beberapa warga juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat manakala disalurkan secara tidak tepat sasaran.

Untuk mendukung program percepatan ODF pemerintah kabupaten telah melakukan penciptaan kondisi dengan mengeluarkan kebijakan terkait STBM. Namun pemerintah desa belum sepenuhnya menjadikan regulasi tersebut sebagai pedoman program pencapaian ODF. Kebijakan tersebut kelihatannya lebih banyak digunakan hanya sebagai syarat administrasi untuk mengikuti lomba kabupaten sehat mengingat dalam salah satu variabel penilaian terdapat aspek legalitas terkait ODF. Pemerintah desa melaksanakan program STBM bukan karena adanya Kebijakan Bupati (Perbup ataupun

instruksi). Pemerintah desa memberikan bantuan fisik jamban sesuai kebijakan yang tertuang dalam Permendes No. 6 tahun 2015, sebagaimana telah diubah dalam Permendes No. 22 Tahun 2018, kemudian berubah lagi menjadi Permendes No. 11 Tahun 2019. Perubahan terakhir yaitu Permendes No. 6 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Hambatan Capaian 100 Persen Akses Jamban

Edukasi PHBS termasuk Stop BABS oleh tenaga kesehatan dan upaya penciptaan kondisi melalui kebijakan pemerintah daerah telah dilakukan. Penciptaan kondisi dan pemberian edukasi baik bentuk pemucuan maupun bentuk *door to door* dalam berbagai kesempatan belum sepenuhnya dapat mengubah perilaku *last mile* dari BABS menjadi perilaku sehat.

Hasil kajian Unicef-BaKTI memetakan kelompok *last mile* dalam dua klasifikasi status ekonomi, yaitu *upper-lower* dan *lower-lower*. Kelas *upper-lower* merupakan warga dengan pendapatan satu hingga dua juta rupiah, sedangkan kelas *lower-lower* kurang dari satu juta rupiah per bulan. Kedua kelompok *last mile* tersebut masih mempraktikkan BABS disebabkan berbagai faktor.

Faktor penyebab BABS pada kelompok *last mile* dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: faktor predisposisi (*predisposing factors*), faktor penguat (*reinforcing factors*) dan faktor pemungkin (*enabling factors*).

Faktor predisposisi merupakan faktor penyebab lambatnya akses jamban dari internal kelompok *last mile*. Kelompok *last mile* belum menjadikan jamban sebagai skala prioritas (kebutuhan primer) baik bagi kelas *upper-lower* maupun *lower-lower*. Skala prioritas kelas *lower-lower* lebih mengutamakan kebutuhan pokok (primer) untuk menyambung hidup sehari-hari, seperti: makan, minum dan kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan kelas *upper-lower* lebih mengutamakan kebutuhan sekunder dan tersier, seperti: kepemilikan kendaraan bermotor, renovasi rumah, kebutuhan pesta bahkan sampai pada perjalanan umrah.

Pengabaian kebutuhan jamban semakin kuat apabila warga *last mile* menempati lahan yang bukan milik sendiri. Sebagian *last mile* menempati rumah yang dibangun di atas lahan milik orang lain. Skala prioritas juga diperparah dengan adanya persepsi terhadap pembangunan jamban yang mahal.

Sementara itu, faktor penguat berasal dari eksternal kelompok *last mile*. Sinergi lintas sektor khususnya antara Puskesmas dengan pemerintah desa dalam upaya pencapaian akses jamban belum optimal. Pemerintah desa cenderung mengharapkan kinerja lebih pada pihak Puskesmas. Menurutnya hal itu menjadi tanggung jawab pihak Puskesmas karena berkaitan dengan program kesehatan. Pada sisi lain, pihak Puskesmas juga sangat berharap kepada pemerintah desa agar menggunakan kewenangannya dalam pencapaian ODF.

Adapun faktor pemungkin berupa faktor lingkungan, seperti akses air bersih yang rendah, akses jalan/transportasi yang sulit, luas lahan, dekat pesisir, dan keberadaan sungai. Namun

kondisi ini bisa teratasi jika terjadi sinergitas yang baik antara pihak Puskesmas dengan pihak pemerintah desa.

Praktik baik dari sinergi pihak terkait dalam menjangkau kelompok *last mile* BABS dapat dilihat di Dusun Belaka Desa Gentung Kabupaten Pangkep. Wilayah tersebut sulit mengakses air bersih dan kondisi jalan hanya pematang empang, namun dusun tersebut bisa ODF. Tercapainya ODF Dusun Belaka Desa Gentung disebabkan adanya program bantuan bak air tahun 2017 dan bantuan jamban tahun 2018. Terlaksananya program ini atas kerja sama antara pihak Puskesmas Labakkang dengan Pemerintah Desa Gentung.

Untuk percepatan ODF, maka disarankan kepada pihak pemerintah desa/kelurahan agar program bantuan pembangunan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan kepada kelas *lower-lower* yang pendataannya dikoordinasikan dengan pihak Puskesmas. Pemberian bantuan sarana sanitasi kepada kelas *lower-lower* perlu dilanjutkan dengan bantuan padat karya yang lebih produktif. Bantuan padat karya disesuaikan dengan teknologi dan potensi sumber daya lokal, untuk menambah pendapatan kelas *lower-lower* guna keberlanjutan penggunaan sarana sanitasi yang sudah dibangun.

Pihak Puskesmas diharapkan agar mengoptimalkan pemberian edukasi mengenai PHBS (Stop BABS), baik melalui pemicuan maupun secara *door to door* kepada warga utamanya kelas *upper-lower* dengan bekerja sama pihak pemerintah desa. Dibutuhkan sinergi antara camat, kepala desa/lurah, Babinsa, sanitarian, petugas Promkes, petugas PIS-PK, fasilitator STBM, BPMD, dan OPD terkait dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan program pencapaian akses jamban.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program Kerjasama Unicef dan Yayasan BAKTI, dapat menghubungi info@bakti.or.id



DISKUSI ONLINE LIVE DI **Instagram Story @infobakti**



BELAJAR BAHASA GAMBAR

Ada pepatah yang mengatakan, "Satu gambar mengatakan lebih dari seribu kata". Itu berarti bahwa satu gambar dapat menimbulkan efek tertentu.

Sementara untuk perkataan, dibutuhkan lebih banyak kata-kata.

Gambar memiliki fungsi berbeda dari kata dan dapat menyampaikan emosi lebih baik. Gambar bisa menunjukkan kepada kita beberapa hal dalam waktu bersamaan secara keseluruhan.

Ngobrol seru jelang *weekend* bersama kang Deni Ganjar Nugraha, gambar sebagai bahasa juga perlu dipelajari dan apa serunya belajar bahasa gambar.



PERTANIAN ALAMI EKSI DI TENGAH PANDEMI

Pangan merupakan penjamin kehidupan, lingkungan merupakan penjamin keberlanjutan pembangunan. Ketahanan pangan dan jaminan keberlanjutan lingkungan merupakan dua hal yang harus dihadirkan bersama. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tantangan semakin berat dalam menghadirkan keduanya sekaligus. Kelompok KSPS (Komunitas Swabina Pedesaan Salassae) di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan sejak 2011 telah mempraktikkan pertanian alami yang sehat dan ramah lingkungan.

Bagaimana KSPS mengubah perilaku dan memberdayakan petani agar terlepas dari jerat ketergantungan pada industri pertanian kimia yg lebih banyak merugikan petani dan merusak bumi. Pak Armin Salassa (Praktisi Praktik Cerdas Pertanian Alami) akan berbagi cerita.



PANGAN, TANAH, DAN MASYARAKAT

Di masa pandemi ini, gerakan-gerakan penguatan pangan lokal sebagai sumber pangan masyarakat di kota dan di desa mulai digalakkan, terutama kebutuhan pangan keluarga. Pangan lokal atau tanaman yang dibudidayakan di sekitar pekarangan atau kebun menjadi harapan bagi keluarga saat akses terhadap pasar yang menyediakan kebutuhan harian sulit.

Ester Elisabeth Umbu Tara – Alumni Program INSPIRASI tahun 2018 bersama Perkumpulan Pikul dan SkolMus memperkenalkan kekayaan pangan yang dimiliki oleh masyarakat NTT dengan beragam cara mengolah dan inovasi yang dapat diterapkan dalam menu sehari-hari dalam pemenuhan gizi keluarga.

Gender dan Pendidikan di Indonesia: Kemajuan yang Masih Membutuhkan Kerja Keras

Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam mencapai kesetaraan gender selama satu dekade terakhir. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya tingkat literasi, angka partisipasi sekolah, dan ketenagakerjaan, serta kebijakan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berkeadilan gender.

Pada tahun 1970-an, Gender Parity Index (GPI) untuk angka partisipasi sekolah (rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki yang terdaftar di sekolah) pada anak-anak usia 7-12 tahun adalah 0,89. Ini menunjukkan perbedaan signifikan yang memihak kepada anak laki-laki. Kesenjangan ini tampak lebih lebar seiring bertambahnya umur anak-anak. Namun, pada tahun 2019 Indonesia telah mencapai kesetaraan gender dalam hal partisipasi sekolah di tingkat nasional, dengan GPI 1,00 untuk angka partisipasi sekolah pada anak-anak usia 7-12 tahun.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Bank Dunia baru-baru ini, dengan dukungan dari Pemerintah Australia, terkait gender dalam pendidikan, menemukan bahwa meskipun rata-rata nasional telah mengalami peningkatan, berbagai perbedaan signifikan terjadi di tingkat daerah, baik yang memihak pada anak laki-laki maupun perempuan.

<https://batukarinfo.com/komunitas/articles/gender-dan-pendidikan-di-indonesia-kemajuan-yang-masih-membutuhkan-kerja-keras>

Referensi

Panduan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan di Desa



Mandat dan amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tersebut, dituangkan dalam salah satu prioritas RPJMN IV (2020-2024) yakni meningkatkan kualitas SDM yang ditandai dengan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Selain itu, target SDGs 5 bertujuan untuk mencapai keadilan gender dan memberdayakan perempuan, di mana poin 5.5 menetapkan target untuk menjamin partisipasi di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.

Merespons visi tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dukungan mitra pembangunan Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK dan MAMPU, bekerja sama mendorong replikasi dan perluasan pengalaman baik Yayasan Perempuan Kepala Keluarga (PEJJA) dan Institut KAPAL Perempuan dalam mengimplementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, melalui Pemberdayaan Perempuan Desa.

<https://batukarinfo.com/node/35574>

Peluang

Split-Site Master's Scholarship Program for Civil Servants Working in the Health Sector

The Ministry of Health collaborates with Australia Awards in Indonesia, Hasanuddin University, and Griffith University to deliver the Split-Site Master's Scholarship Program for civil servants working in the health sector, for the academic year of 2021-2023.

This scholarship program consists of 1 year of study at Hasanuddin University, Indonesia and 1 year of study at Griffith University, Australia. At the end of study, students will get two degrees, which are Magister Kesehatan Masyarakat and Master of International Public Health.

If you are a civil servant working at the Provincial/District Health Office, hospital or community health centre and interested in pursuing higher education in Australia, please register by the latest 31 January 2021.

For more information: <https://batukarinfo.com/news/split-site-masters-scholarship-program-civil-servants-working-social-sector>

Berita Terbaru

Pengelolaan Pembiayaan, Respon Cepat Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi

(Beritadaerah – Nasional) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kondisi pandemi Covid-19 yang membuat postur keuangan negara pada APBN, khususnya penerimaan negara turun namun belanja negara meningkat. Hal ini berimplikasi terhadap pelebaran defisit APBN hingga 6,34%. Untuk itu, perlu diperhitungkan pembiayaan sebagai respon cepat pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Hal ini disampaikan dalam acara *Investor Gathering virtual* yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) sebagai apresiasi untuk para Mitra Distribusi dan Mitra Penerbit baik Surat Berharga Negara (SBN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Kamis (17/12).

<https://batukarinfo.com/news/pengelolaan-pembiayaan-respon-cepat-pemulihan-ekonomi-di-tengah-pandemi>